



PENDOKUMENTASIAN PROGRAM **SEPEDA KEREN**

*Upaya Memperkuat Pembangunan Desa
yang Inklusif*

PENDOKUMENTASIAN PROGRAM
SEPEDA KEREN

*Upaya Memperkuat Pembangunan Desa
yang Inklusif*

Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Provinsi Jawa Timur

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Pendokumentasian Program SEPEDA KEREN Upaya Memperkuat Pembangunan Desa yang Inklusif

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis

Astutik Supraptini

Penyunting

Ancilla Irwan

Enurlaela Hasanah

Grace Palayukan

Lilis Suryani

Ratna Fitriani

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Email: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

KATA PENGANTAR

Kabupaten Trenggalek mempunyai visi besar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan” dan salah satu misinya “Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima”. Visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek ini disusun berdasarkan realitas di mana keterlibatan kelompok rentan seperti ekonomi prasejahtera (miskin), disabilitas, anak, masyarakat terdampak konflik, korban kekerasan dan bencana dan lain sebagainya dalam proses pembangunan masih belum memadai. Secara umum permasalahan yang dihadapi kelompok rentan di antaranya adalah praktik diskriminasi dan kekerasan, partisipasi dalam bidang sosial ekonomi dan politik yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) dan lain sebagainya. Beragam keterbatasan tersebut telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam mengisi pembangunan. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Trenggalek mencapai 12,14% (lebih tinggi dari nasional yaitu 10,14%) dan terdapat lebih dari 7% perempuan buta huruf; 23,45 % dari 4.798 penyandang disabilitas yang belum mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemda Trenggalek mengembangkan kebijakan afirmasi melalui Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (SEPEDA KEREN) yang diinspirasi dari praktik-praktik terbaik mitra lokal dari program-program dukungan DFAT di Jawa Timur. Sepeda Keren adalah pendidikan alternatif untuk kelompok perempuan, anak dan rentan lainnya dalam meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan di desa. Sesuai yang diatur dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan PP No 54/2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, proporsi peran perempuan dan kelompok rentan menjadi satu keharusan. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan pasal 54 dalam UU Desa No.6 tahun 2014, yang menjelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Dari sisi supply, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggagas Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan (MUSRENA-KEREN) yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 sebagai forum afirmasi yang melibatkan kelompok rentan dan para pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang berfokus untuk membahas persoalan, kebutuhan dan usulan untuk penyelesaian persoalan dalam usulan prioritas tingkat desa, kecamatan dan kabupaten khusus tentang perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan yang terintegrasi secara utuh dalam mekanisme Musrenbang. Sedangkan dari sisi demand, tercetus program inovasi SEPEDA KEREN yang muncul berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam urusan tata kelola, penganggaran desa, sehingga kelompok-kelompok ini dapat berpartisipasi dan mengambil kontrol dalam keseluruhan proses pembangunan di desa.

Sebagai upaya untuk melembagakan program ini, KOMPAK mendukung kajian khusus untuk mendokumentasikan hasil dan pembelajaran tentang Pemberdayaan masyarakat yang dikolaborasikan antara Pemda dan CSO. Selain itu, secara spesifik ingin menangkap bentuk inovasi pendidikan alternatif dalam memberdayakan kelompok marginal yang diambil dari pembelajaran kerja-kerja CSO selama belasan bahkan puluhan tahun, lalu direplikasi, dijalankan dan didanai oleh PEMDA sendiri. Kajian ini diharapkan menjadi bahan tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk mensukseskan inisiatif ini kedepannya dan dapat dibagikan ke daerah-daerah lainnya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ibu Bupati Trenggalek beserta jajarannya, Forum PUSPA, SEKNAS FITRA Jawa Timur, LPKP, PEKKA, LPA Trenggalek, KPI Jawa Timur, SAPDA Yogyakarta, Kepala Desa dan Camat, mentor sepeda Keren dan para penerima manfaat, yang telah membantu dalam penulisan dokumentasi ini. Semoga SEPEDA KEREN terus bisa mendorong terciptanya agen perubahan untuk mewujudkan pembangunan Trenggalek yang lebih inklusif, transparan dan akuntabel.

Team Leader KOMPAK
Anna Winoto

RINGKASAN EKSEKUTIF

SEPEDA KEREN merupakan kegiatan inovatif yang dilakukan oleh Pemda Trenggalek untuk pemberdayaan kelompok rentan, sebagai upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dari sisi perencanaan dan penganggaran.

Pendokumentasian ini bertujuan untuk: 1) menelaah proses dan hasil Program SEPEDA KEREN yang telah berjalan selama dua tahun (2019-2020) dan telah diadopsi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek; 2) sebagai bahan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk menyukseskan dan melanjutkan inisiatif ini kedepannya, dan bagi wilayah lain yang akan melaksanakan mekanisme serupa, mengingat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif menjadi mandat bagi pemda di seluruh wilayah Indonesia; 3) berbagi pengetahuan mengenai SEPEDA KEREN sebagai model pendidikan alternatif dengan pendekatan GESI yang kuat, yang selama ini belum pernah ada kajian atau pendokumentasian (baik di KOMPAK atau diluar) mengenai sebuah model pemberdayaan alternatif bagi kelompok rentan; dan 4) sebagai masukan bagi pengembangan strategi pengakhiran program KOMPAK di Kabupaten Trenggalek, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga dapat dipastikan tujuan program tercapai dan dampak positif yang diciptakan tetap dapat bertahan.

Informasi yang dipaparkan dalam pendokumentasian ini adalah: 1) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan alur proses (business process) yang terkait dengan pelaksanaan SEPEDA KEREN; 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program, baik faktor pendukung dan penghambat, termasuk regulasi, pengaturan tata kelola, dukungan institusional dan anggaran, kapasitas dan pengetahuan pelaku, dampak pandemi COVID-19 pada program; 3) Mengidentifikasi kualitas implementasi, serta konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, khususnya menurut peserta pelatihan SEPEDA KEREN; 4) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik baik dan pembelajaran, termasuk upaya replikasi atau perluasan cakupan.

TEMUAN PENDOKUMENTASIAN

Pengembangan Desain SEPEDA KEREN

Pemda Trenggalek mengadopsi metode dan pengalaman OMS bekerja dengan kelompok rentan untuk diterapkan dalam SEPEDA KEREN. Proses desain program dilakukan secara partisipatif antara Pemda Kabupaten Trenggalek, yaitu Dinsos P3A dan OPD terkait lainnya (Sekda, Bappeda, DPMD), Forum PUSPA, Konsorsium OMS dan didukung oleh Program KOMPAK untuk menentukan:

- Visi misi.
- Komponen regulasi, kelembagaan, pelaksana kegiatan.
- Perubahan yang dikehendaki dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini adalah 5 tahun (2019-2024) sehingga luaran dan capaian dapat diukur.
- Aktivitas dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas tersebut.

Struktur Kelembagaan SEPEDA KEREN. Forum PUSPA merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN. Penetapan struktur kelembagaan SEPEDA KEREN melalui forum ini tepat dan strategis, karena forum ini memiliki potensi keberlangsungan kegiatan karena sebagai forum bersama antara pemerintah, OMS, serta pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi, media dan swasta dengan model kerja jaringan pemangku kepentingan. Keberadaan SEPEDA KEREN diharapkan dapat merevitalisasi forum ini untuk berperan mendorong pemberdayaan kelompok rentan sebagai gerakan bersama pada pemangku kepentingan yang tergabung di dalamnya. Memang saat ini fungsi Forum PUSPA sebagai penanggung jawab pelaksanaan program ini belum berjalan maksimal. Masih diperlukan upaya untuk mengintensifkan koordinasi internal dan memanfaatkan potensi jaringan pemangku kepentingan yang tergabung di dalamnya, sehingga peran dan fungsi institusi forum sebagai wadah terbuka untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak serta kelompok rentan lainnya di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan optimal.

Cakupan Kegiatan SEPEDA KEREN. Sumber daya kegiatan ini adalah 25 orang mentor, mereka merupakan fasilitator pelatihan bagi kader. Sampai bulan Juli 2021, Pemda Trenggalek telah melaksanakan pelatihan kader di 11 kecamatan atau 78,5% dari total 14 kecamatan di Trenggalek. Jumlah total kader SEPEDA KEREN per Juli 2021 adalah 482 kader yang tersebar di 81 desa atau 53,3% dari total desa di Kabupaten Trenggalek. Cakupan kuantitas kader ini sesuai dengan target SEPEDA KEREN untuk menjangkau kader secara massif, di mana dengan variasi kualitas kader pendampingan kapasitas sesuai desain program dapat dilakukan secara simultan oleh mentor dan pihak lain yang relevan.

Kontribusi SEPEDA KEREN pada Indikator Pembangunan Inklusif Daerah

- Semua desa telah melaksanakan Musrena Keren dan terdapat peningkatan kehadiran kelompok rentan dan usulan yang disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan di desa.
- Usulan yang disampaikan oleh kelompok rentan mendapatkan apresiasi dan Sebagian telah diakomodir oleh Pemdes dan Pemda, misalnya: APBDes di kecamatan 5 ujicoba telah menganggarkan beasiswa disabilitas bagi anak yang bersekolah di SDLB, Pemda Trenggalek merespons usulan untuk pelatihan wirausaha bagi kelompok rentan dengan memanfaatkan dukungan program donor lain yang telah menjangkau 812 perempuan dan 101 penyandang disabilitas, dan ide mengenai responsivitas pemerintah desa pada kebutuhan disabilitas didukung oleh Pemda Trenggalek dengan membentuk desa ramah disabilitas. Sampai bulan Juli 2021 telah terdapat 60 desa ramah disabilitas di Kabupaten Trenggalek.
- Adanya peningkatan indeks pembangunan seperti IPG dan IDG. IPG Kabupaten Trenggalek naik dari 92,54 di tahun 2018 menjadi 92,74 di tahun 2019 dan 92,93 di tahun 2020. Kemudian IDG meningkat dari 65,21 di tahun 2018 menjadi 66,86 di tahun 2019 dan 70 di tahun 2020. Peningkatan IDG berarti kegiatan SEPEDA KEREN berkontribusi pada indeks pembangunan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor ekonomi dan politik di daerah.

Praktik Baik Pelaksanaan Kegiatan SEPEDA KEREN

- Komitmen politik Bupati untuk transformasi tata kelola pemerintahan inklusif dan memberi ruang bagi kelompok rentan. Komitmen politik ini ditunjukkan dengan masuknya prinsip pembangunan inklusif dalam dokumen RPJMD 2021-2026, surat edaran dan dukungan anggaran dari APBD, sehingga dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan semakin banyak jumlah kader dan kelompok rentan yang mendapatkan penguatan kapasitas.
- Pembiayaan kegiatan SEPEDA KEREN mulai melibatkan pemerintah desa dengan pemanfaatan dana desa untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan transport bagi kader saat pelatihan atau pertemuan kader.
- Desain program yang partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan terkait lintas sektor, sehingga memperkaya perspektif dan juga dukungan lintas sektor bagi pelaksanaan program.
- Program inovasi ini mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh OMS yang telah teruji dan memiliki perspektif GESI yang kuat dalam setiap aspek tahapan program.
- Program ini memiliki modul dan metode belajar yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan kelompok rentan, dengan sedikit perbaikan untuk memperhatikan mekanisme dan metode fasilitasi yang mempertimbangkan ragam kebutuhan penyandang disabilitas.

Faktor yang Memengaruhi Kegiatan SEPEDA KEREN

- **Dukungan regulasi.** Meskipun belum memiliki regulasi yang kuat sebagai payung program pemberdayaan kelompok rentan, Pemda Trenggalek memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan teknis untuk mendorong pelaksanaan SEPEDA KEREN dan pembangunan inklusif daerah di mulai dari desa, misalnya penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang inklusif dengan memasukkan usulan dari Musrena Keren, arahan melibatkan kader dan mentor dalam forum perencanaan pembangunan yang berjenjang.
- **Dukungan lintas sektor.** Dukungan lintas sektor yang potensial misalnya DPMD bersama Dinsos P3A melakukan sosialisasi SEPEDA KEREN di desa, Pemda menyediakan Sekretariat Rumah Perempuan yang menjadi wadah pemberdayaan, dukungan program penguatan ekonomi dari OPD lain, dan program kewirausahaan untuk kelompok rentan.
- **Dukungan anggaran.** APBD Kabupaten Trenggalek 2019, 2020 dan 2021 tetap menganggarkan pelaksanaan program SEPEDA KEREN dengan besaran anggaran yang bervariasi besarnya karena pengaruh pandemi. Adanya dukungan ini tidak lepas dari upaya Dinsos P3A melakukan advokasi anggaran pembiayaan kegiatan SEPEDA KEREN pada Pemda Trenggalek dan mendorong Pemdes terlibat membiayai penyelenggaraan pelatihan Kader SEPEDA KEREN (membiayai pengeluaran konsumsi dan transport warga mereka sebagai kader yang dilatih).

- **Dukungan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.** Belum semua kecamatan dan pemerintah desa memberikan dukungan optimal pada pelaksanaan Kegiatan SEPEDA KEREN. Penyebab kondisi ini adalah mereka belum memahami sepenuhnya mengenai tujuan dan manfaat program. Hal ini dipahami oleh DPMD dan Dinsos P3A bahwa masih diperlukan sosialisasi mengenai program, termasuk pendampingan teknis pada desa dalam menyusun program/kegiatan dan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN.
- **Dampak dan adaptasi kegiatan terhadap pandemi COVID-19.** Terjadi pengurangan anggaran kegiatan sejumlah 50% pada tahun 2020 yang dialihkan bagi penanganan dampak pandemi di masyarakat. Konsekuensi pengurangan anggaran ini adalah berkurangnya jangka waktu pembelajaran dan intensitas pembelajaran/pendampingan mentor. Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas dan materi pembelajaran yang padat, menyebabkan diperlukannya pendampingan bagi kader untuk pendalaman materi dan melakukan praktik pengorganisasian pada kelompok rentan di desa.

Pengarusutamaan GESI dalam Kegiatan SEPEDA KEREN

Kegiatan ini telah mengimplementasikan prinsip GESI mulai dari desain program, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program. Hasil dari pelatihan Mentor dan Kader SEPEDA KEREN sudah terlihat pada perubahan perspektif terkait GESI, misalnya upaya merubah relasi gender yang lebih setara dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, hak perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan di desa, pemahaman tentang kelompok rentan dan haknya. Hal yang masih perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran perspektif GESI pada para pemangku kepentingan terutama pada pemerintah kecamatan, desa, masyarakat umum, dan OMS lokal adalah: 1) menyusun bahan yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan konteks sehari-hari. Misalnya pengertian kesetaraan gender, maksud dari inklusi sosial, mengapa isu ini penting terkait dengan hak kelompok rentan, dsb; 2) mendorong penerimaan sosial pada penyandang disabilitas, yang memandang mereka sebagai manusia yang memiliki potensi untuk kehidupannya dan masyarakat. Dukungan yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman pada pemangku kepentingan (terutama pemerintah desa) bahwa memberdayakan penyandang disabilitas sesuai potensi, kondisi dan kebutuhan mereka, bukan lagi bantuan (charity); 3) mendorong keterlibatan lebih banyak OMS lokal untuk terlibat dalam kegiatan SEPEDA KEREN, sehingga mereka memahami isu GESI dan membawa isu ini ke dalam organisasi dan jaringan kerja mereka.

Tantangan SEPEDA KEREN

- **Kapasitas mentor.** Sebagian besar mentor belum sepenuhnya memahami materi dengan baik, ketiadaan pertemuan koordinasi untuk penyegaran dan pendalaman materi, menyebabkan mentor mengalami kesulitan untuk menyampaikan materi kepada kader dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
- **Kapasitas kader.** Bagi kader dan mentor, pelatihan yang dilakukan dalam waktu yang singkat selama 5 hari pada akhir November 2021 dirasa kurang efektif. Pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan persiapan Pemilukada, di mana hampir separuh peserta adalah panitia pemungutan suara di desa, memengaruhi kehadiran kader saat pelatihan. Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas, materi pembelajaran yang padat menyebabkan pengetahuan mereka masih kurang untuk melakukan peran sebagai kader.

- **Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas** juga dilakukan pada pelatihan kader di 6 kecamatan lainnya pada tahun 2020 dan 2021. Secara umum pelatihan ini dilakukan dalam waktu satu hari pertemuan. Cakupan kuantitas kader yang dijangkau oleh kegiatan ini, perlu diimbangi oleh pertemuan lanjutan untuk memantapkan pemahaman terhadap tujuan dan materi keseluruhan SEPEDA KEREN.
- **Pembiayaan yang kurang memadai** untuk kebutuhan kegiatan. Alokasi anggaran yang dialihkan untuk pembiayaan penanganan pandemi corona, mengakibatkan kurangnya dukungan pembiayaan bagi pelaksanaan program. Misalnya:
 - Dalam desain program, terdapat kegiatan pendampingan kader yang dilakukan mentor pasca pelatihan kader dengan tujuan untuk penguatan materi dan kapasitas kader. Kegiatan ini tidak dilakukan karena tidak adanya dukungan pembiayaan.
 - Minimnya dukungan keuangan bagi mentor untuk melakukan pendampingan bagi kader, yang mempengaruhi keaktifan mereka untuk tetap memberikan pendampingan pada kader.
- **Proses pemantauan dan evaluasi.** Sampai pertengahan 2021, pelaku pelaksanaan SEPEDA KEREN belum melakukan pemantauan perkembangan kegiatan SEPEDA KEREN.
- **Kapasitas kelembagaan penanggung jawab pelaksanaan SEPEDA KEREN** yang belum maksimal sesuai peran dan fungsi yang diharapkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan, praktik baik dan tantangan yang dihadapi oleh SEPEDA KEREN, terdapat dua rekomendasi, yaitu rekomendasi yang disampaikan untuk pemerintah baik Kementerian terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan wilayah lainnya yang melakukan replikasi, dan rekomendasi secara umum:

Kementerian Desa PDTT (Kemendesa) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPPA) untuk mendorong SEPEDA KEREN sebagai model pemberdayaan bagi kelompok rentan. Pemberdayaan kelompok rentan di desa sangat terkait dengan pencapaian SDGs Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

- Mendorong RaPerda PUG segera disahkan sehingga daerah memiliki acuan pelaksanaan program dan penganggaran secara lebih kuat, serta dukungan lintas sektor.
- Memberikan dukungan pembiayaan dari APBD yang memadai untuk pelaksanaan SEPEDA KEREN, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tidak hanya untuk pelatihan saja tetapi juga pendampingan bagi kader, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, dan penyediaan fasilitas dan akomodasi yang lebih inklusif yang menunjang keterlibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

- Saat ini strategi Pemda Kabupaten Trenggalek adalah meluaskan jangkauan pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan banyak kader. Kedepannya perlu dialokasikan waktu, pendanaan dan strategi¹ yang tepat untuk pendalaman materi sebagai penguatan kapasitas, agar mereka mampu menjalankan perannya sebagai kader SEPEDA KEREN.
- Mendorong intensitas kerjasama lintas sektor untuk pelaksanaan SEPEDA KEREN. Lokus kegiatan adalah di desa, sehingga penting bagi OPD terkait (DPMD) melakukan sosialisasi dan penguatan bagi pemerintah desa, sehingga secara konsep dan teknis memahami kegiatan ini serta memberikan dukungan berbentuk program dan anggaran. Dalam kerangka kebijakan nasional, dukungan pemerintah desa untuk kegiatan ini dapat menjadi strategi akselerasi pencapaian SDGs Desa.
- Mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran bagi kegiatan SEPEDA KEREN dan Kader. Alokasi anggaran ini dimungkinkan dengan merujuk pada regulasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Memberikan penguatan kelembagaan Forum PUSPA sehingga lebih aktif melaksanakan perannya dalam mengelola sumber daya internal dan jaringan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan dan terlibat aktif. Forum PUSPA dapat memanfaatkan potensi jaringan kerja OMS lokal yang mampu menjangkau desa-desa. Kerja sama dengan OMS lokal dimungkinkan dengan model kolaborasi multipihak, di mana pemerintah menyediakan dukungan pendanaan² untuk pendampingan dalam pengorganisasian warga yang dilakukan Kader SEPEDA KEREN.
- Melakukan kerja sama dengan OMS yang memiliki keahlian untuk menguatkan kapasitas mentor dan kader.

Rekomendasi bagi Wilayah lain untuk Mereplikasi SEPEDA KEREN

- Mereplikasi kegiatan ini perlu diikuti oleh komitmen politik kepala daerah yang terlihat dalam komponen utama kegiatan, yaitu: regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang cukup sesuai jangka waktu pelaksanaan program.
- Melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dan OMS untuk memperkaya perspektif, desain program, dan komitmen melaksanakannya. Pemerintah daerah yang mereplikasi program ini, penting membangun kolaborasi dengan OMS yang memiliki jaringan sampai ke desa.
- Melakukan pemetaan sosial secara komprehensif dan partisipatif, sehingga data yang terkumpul mencerminkan permasalahan sesuai konteks desa yang beragam, yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai kondisi lokasi.
- Menguatkan kapasitas mentor dan kader dengan memperhatikan kebutuhan mereka untuk melaksanakan kegiatan sesuai keragaman konteks daerah.

¹ Termasuk menggunakan pertemuan daring untuk diskusi-diskusi rutin jika akses memungkinkan.

² Pembiayaan bagi OMS dapat memanfaatkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, aturan ini diperbarui dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021

Rekomendasi Umum

- Merancang strategi komunikasi dengan materi yang mudah dipahami sebagai alat sosialisasi program bagi pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat umum.
- Menyusun panduan kader dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
- Mempertimbangkan wilayah dampingan mentor sesuai dengan domisili atau dekat dengan domisili. Pertimbangan ini menjadi alternatif untuk kehadiran melakukan pendampingan intensif karena alasan jarak tempat tinggal yang jauh dengan dukungan pendanaan yang relatif kecil.
- Pentingnya melakukan pemantauan partisipatif secara berkala untuk mendapatkan informasi kemajuan program, yang menjadi dasar perbaikan dan masukan bagi pencapaian.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Daftar Isi.....	xii
Daftar Diagram	xiii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Pertanyaan Pendokumentasian	3
1.4 Ruang Lingkup Pendokumentasian.....	3
Bab 2. Metodologi Pendokumentasian	5
2.1 Metode Pengambilan Data dan Jadwal Pengambilan Data	5
2.2 Kerangka Konseptual dan Analisis	7
Bab 3. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan SEPEDA KEREN.....	11
3.1 Konteks Lokasi Pelaksanaan SEPEDA KEREN	11
3.2 Tahapan Pelaksanaan SEPEDA KEREN	14
Bab 4. Analisis Pelaksanaan SEPEDA KEREN	25
4.1 Proses pengembangan desain SEPEDA KEREN.....	25
4.2 Struktur kelembagaan yang disusun dan implementasinya.....	27
4.3 Pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN.....	27
4.4 Pelaksanaan SEPEDA KEREN di luar wilayah uji coba	34
4.5. Perubahan yang diamati dan praktik baik	35
4.6 Faktor yang memengaruhi implementasi SEPEDA KEREN.....	39
4.7 Ringkasan: Analisis Pelaksanaan SEPEDA KEREN dan Capaian	45
Bab 5. Kesimpulan dan Rekomendasi	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Rekomendasi.....	51
Daftar Pustaka	53
Lampiran 1. Visi, Misi dan Tujuan SEPEDA KEREN	54

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1. Kerangka Perubahan Bennet	9
Gambar 2. Bagan SEPEDA KEREN dan Musrena Keren untuk Pembangunan Inklusif.....	12
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan SEPEDA KEREN.....	14
Gambar 4. Struktur Kelembagaan SEPEDA KEREN Kabupaten Trenggalek	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan Pendokumentasian SEPEDA KEREN	6
Tabel 2. Peran Pemangku Kepentingan dalam SEPEDA KEREN.....	18
Tabel 3. Modul SEPEDA KEREN	19
Tabel 4. Peran Pelaku dalam SEPEDA KEREN 2019-2020.....	26
Tabel 5. Profil Kader SEPEDA KEREN 1 di 5 Kecamatan Uji Coba.....	30
Tabel 6. Contoh RTL Kader SEPEDA KEREN 1 di 6 Desa Lokasi Program	33
Tabel 7. Profil Kader SEPEDA KEREN di dua kecamatan non-Uji Coba.....	34
Tabel 8. Pelatihan Kader SEPEDA KEREN 2 tahun 2021.....	35
Tabel 9. Pembiayaan APBD untuk Kegiatan SEPEDA KEREN 2019-2021	41

DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	: Administrasi Kependudukan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dinas PMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinsos P3A	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	: Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Forum PUSPA	: Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
GESI	: Gender Equality and Social Inclusion atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
KAPAL PEREMPUAN	: Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPG (IDG)	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kemendesa PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KLA	: Kabupaten Layak Anak
KLIK	: Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
LPKP Jatim	: Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur
MUSRENA KEREN	: Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan
Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
ODGJ	: Orang dengan Gangguan Jiwa
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PATBM	: perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PEKKA	: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Posyandu Lansia	: Pos Pelayanan Terpadu Kelompok Lanjut Usia
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PUHA	: Pemenuhan Hak Anak
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
SAPDA Yogyakarta	: Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel dan Anak Yogyakarta
SD	: Sekolah Dasar
Sekar Desa	: Sekolah Anggaran Desa
SEPEDA KEREN	: Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya
SID	: Sistem Informasi Desa
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TK	: Taman Kanak-Kanak



SEPEDA KEREN menjadi suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian kelompok rentan

Bab 1.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fokus pendokumentasian ini adalah pada upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (Pemda Trenggalek) untuk melakukan intervensi pembangunan daerah yang lebih inklusif melalui pemberdayaan kelompok rentan. Kelompok rentan di sini yaitu perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini bertujuan agar suara kelompok rentan dapat memengaruhi pembangunan daerah, yang dalam jangka panjang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.

Isu pembangunan inklusif menjadi penting karena kelompok rentan merupakan anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk menikmati kehidupan yang layak. Identitas sosial seperti usia, jenis kelamin, kondisi disabilitas, letak tempat tinggal secara geografis dan penanda sosial lainnya dapat menyebabkan dan mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses sumber-sumber pemenuhan kesejahteraan sosial hidupnya. Kecenderungan selama ini perencanaan pembangunan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan masih bersifat top-down atau pengambilan keputusan oleh pemerintah pemegang kewenangan, yang didominasi oleh pejabat, elit desa dan tokoh masyarakat yang umumnya laki-laki.³ Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2015 dan 2018 menyatakan bahwa peserta perempuan di Musdes hanya seperempat dari total peserta, selain itu pengetahuan mereka mengenai pembangunan desa sangat minim. Studi tersebut juga menyatakan perempuan yang berbicara dalam rapat tersebut hanya sebesar 14%.⁴

Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat desa termasuk kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya di forum musyawarah desa karena masih tingginya persepsi bahwa musyawarah desa hanya untuk pemerintah desa dan tokoh masyarakat.⁵ Kondisi ini menyiratkan bahwa masih ada tantangan untuk mendorong partisipasi mereka. Untuk melibatkan kelompok rentan dalam pembangunan, menjadi penting untuk membuka akses informasi pembangunan, memberikan dukungan untuk berpartisipasi dan melakukan pemberdayaan bagi kelompok rentan sehingga mereka mampu menyuarakan kepentingannya.

³ Oberlin Silalahi dan Ratnawati. 2016. Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender Di Kota Banda Aceh, Palastren, Vol. 9, No. 1.

⁴ Syukri, M., 2019. Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance SMERU Working Paper. Jakarta: SMERU. Diakses dari www.smeru.or.id.

⁵ Dharmawan, L., G.D.V. Pattinasarany & L. Hoo. 2018. Participation, Transparency and Accountability in Village Law Implementation: Baseline Findings from the Sentinel Villages Study. Jakarta, Local Solutions to Poverty & the World Bank

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan dukungan KOMPAK⁶ pada tahun 2018 adalah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan (Musrena Keren). Musrena Keren merupakan forum afirmasi untuk mengakomodir keterwakilan kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah, yang hasilnya diintegrasikan ke dalam Musrenbang reguler mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Adanya Musrena Keren telah mendorong peningkatan kehadiran kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan, namun pengaruhnya dalam pembuatan keputusan perencanaan pembangunan masih rendah. Kehadiran kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan masih bersifat formalitas untuk melaksanakan instruksi pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan yang lebih terstruktur pada kelompok rentan agar mereka mampu terlibat dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan.

Untuk itu tercetuslah inovasi SEPEDA KEREN (Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya) yang diinisiasi oleh istri Bupati Trenggalek pada bulan April 2019. Desain SEPEDA KEREN mengadopsi pengalaman organisasi masyarakat sipil (OMS) yang telah bekerja dengan kelompok marjinal dengan pendekatan pemberdayaan kader di desa sebagai penggerak perubahan dan mengintegrasikan aspek GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*) atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial ke dalam program. Program ini diharapkan menghasilkan sebuah model pendidikan informal alternatif bagi pemberdayaan kelompok rentan di desa, membuka kesadaran pada kelompok rentan dan mendorong mereka menjadi agen perubahan. Dengan demikian mereka dapat berperan aktif menyuarakan kebutuhannya untuk diprioritaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan desain yang disusun, SEPEDA KEREN sebagai inovasi pemberdayaan bagi kelompok rentan dapat berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender, membuka ruang inklusivitas yang lebih luas, mendorong kepemimpinan kelompok marjinal dalam pembangunan desa, meningkatkan kesadaran dan sensitivitas para pemangku kepentingan tentang pentingnya kesetaraan dan sekaligus melakukan advokasi alokasi anggaran yang lebih berpihak bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya. Sehingga program ini dapat berkontribusi pada penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah, terutama bagaimana mendorong partisipasi inklusif yang mampu menjembatani terpenuhinya kebutuhan kelompok rentan.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari pendokumentasian ini adalah:

1. Menelaah proses dan hasil SEPEDA KEREN yang telah berjalan selama dua tahun (2019-2020) dan telah diadopsi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Adopsi SEPEDA KEREN oleh Pemda sebagai sebuah model pemberdayaan kelompok rentan merupakan sebuah praktik baik.

⁶ KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada bulan Januari 2015 dan dilanjutkan hingga 2022. KOMPAK bekerja di tiap tingkat pemerintahan untuk mencari solusi dalam rangka menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di tujuh provinsi. Informasi lebih lengkap tentang KOMPAK dapat dilihat pada www.kompak.or.id.

2. Menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk menyukseskan dan melanjutkan inisiatif ini kedepannya, dan bagi wilayah lain yang akan melaksanakan mekanisme serupa, mengingat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif menjadi mandat bagi pemda di seluruh wilayah Indonesia.
3. Berbagi pengetahuan mengenai SEPEDA KEREN sebagai model pemberdayaan alternatif dengan pendekatan GESI yang kuat, yang selama ini belum pernah ada kajian atau pendokumentasian (baik di KOMPAK atau diluar) aktivitas serupa bagi kelompok rentan.
4. Sebagai masukan bagi pengembangan strategi pengakhiran program KOMPAK di Kabupaten Trenggalek, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga dapat dipastikan tujuan program tercapai dan dampak positif yang diciptakan tetap dapat bertahan.

1.3 PERTANYAAN PENDOKUMENTASIAN

Beberapa pertanyaan yang dijawab dalam pendokumentasian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengembangan desain SEPEDA KEREN di Trenggalek?
2. Apa saja tahapannya?
3. Apakah struktur kelembagaan telah disusun sesuai dengan tujuan program?
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN?
5. Bagaimana pengarusutamaan GESI dalam program ini?
6. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan program? Termasuk pengaruh pandemi COVID-19.
7. Perubahan apa saja yang terjadi dan dapat diamati, serta praktik baik dalam program ini?

1.4 RUANG LINGKUP PENDOKUMENTASIAN

Data pendokumentasian bersumber pada tahapan desain, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN di 5 kecamatan wilayah uji coba. Rentang waktu yang diambil adalah selama dua tahun (2019-2020). Beberapa informasi kegiatan pada tahun 2021 digunakan untuk memperkaya analisis, khususnya menunjukkan capaian sampai paruh tahun pertama 2021 dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Trenggalek.

Informasi yang diuraikan dalam pendokumentasian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan alur proses (business process) yang terkait dengan pelaksanaan SEPEDA KEREN.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program, baik faktor pendukung dan penghambat, termasuk (1) regulasi, (2) pengaturan tata kelola, (3) dukungan institusional dan anggaran, (4) kapasitas dan pengetahuan pelaku, (5) dampak pandemi COVID-19 pada program.
3. Mengidentifikasi kualitas implementasi, serta konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, khususnya menurut peserta pelatihan SEPEDA KEREN.
4. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik baik dan pembelajaran, termasuk upaya replikasi atau perluasan cakupan.



Meski pandemi, pelaksanaan SEPEDA Keren di Kecamatan Bendungan, Trenggalek tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan

Bab 2.

METODOLOGI PENDOKUMENTASIAN

2.1 METODE PENGAMBILAN DATA DAN JADWAL PENGAMBILAN DATA

Pendokumentasian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, FGD, dan studi dokumen. Proses wawancara dan FGD dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom, media perpesanan Whatsapp, dan telepon pada bulan Desember 2020.

Informan pendokumentasian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam SEPEDA KEREN, mulai tahap desain sampai dengan pelaksanaan. Pemilihan informan menggunakan sampling purposif, artinya mereka dipilih sesuai kualifikasi informasi dan posisi dalam kegiatan SEPEDA KEREN, yaitu:

- a. Pemda Kabupaten Trenggalek, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam desain dan pelaksanaan SEPEDA KEREN.
- b. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) sebagai lembaga penanggung jawab pelaksanaan SEPEDA KEREN.
- c. Aparatur Desa Lokasi Ujicoba SEPEDA KEREN.
- d. Mentor SEPEDA KEREN sebagai pelaksana yang memberikan pelatihan dan pendampingan pada Kader SEPEDA KEREN di desa.
- e. Kader SEPEDA KEREN merupakan perwakilan kelompok rentan di desa dan berperan sebagai agen perubahan untuk pembangunan inklusif di desa.
- f. Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang terlibat dalam desain program dan pelatihan bagi mentor.
- g. KOMPAK, baik KOMPAK Nasional, Subnasional dan konsultan KOMPAK yang terlibat dalam kegiatan SEPEDA KEREN.

Sesuai dengan tabel 1, total informan pendokumentasian ini berjumlah 36 orang, 9 laki-laki dan 27 perempuan. Terdapat 2 informan penyandang disabilitas, 1 laki-laki dan 1 perempuan penyandang disabilitas, berasal dari OMS yang bekerja dengan isu disabilitas. Sebagian besar data dikumpulkan melalui wawancara individu. FGD hanya dilakukan pada Konsorsium OMS, karena akses jaringan internet yang lebih stabil pada para informan tersebut.

OMS yang terlibat dalam kegiatan SEPEDA KEREN mewakili variasi isu yang diusung oleh desain SEPEDA KEREN sesuai dengan keahlian masing-masing OMS. OMS tersebut adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jatim yang fokus pada isu perempuan, SAPDA Yogyakarta bekerja dengan penyandang disabilitas, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Trenggalek bekerja untuk isu anak, Lembaga

Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur berpengalaman bekerja untuk isu pekerja migran, Pemberdayaan Perempuan Kepala keluarga (PEKKA) yang berpengalaman bekerja dengan perempuan miskin kepala keluarga, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur yang sudah lama bekerja untuk isu perencanaan penganggaran. Wawancara dengan Forum PUSPA Kabupaten Trenggalek dilakukan pada salah satu pengurus Forum PUSPA dan merupakan informan yang sama dari LPA Trenggalek.

TABEL 1. DAFTAR INFORMAN PENDOKUMENTASIAN SEPEDA KEREN

KATEGORI INFORMAN	JUMLAH	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Pemerintah Daerah Trenggalek		
a. Dinsos P3A	-	2
b. DPMD	1	-
Aparatur Desa di wilayah ujicoba		
a. Kades	1	-
b. Sekdes	1	-
c. BPD	-	1
d. Pengurus PKK	-	2
Mentor SEPEDA KEREN	2	5
Kader SEPEDA KEREN	-	8
OMS Mitra Strategis		
a. KPI Wil. Jawa Timur	-	1
b. PEKKA	-	1
c. SAPDA Yogyakarta	1	1
d. FITRA Jawa Timur	1	-
e. LPKP Jawa Timur	-	1
f. LPA Trenggalek	-	1
KOMPAK	2	4
	9	27
Jumlah	36	

Sumber: data primer, 2020

Wawancara dengan dinas terkait dilakukan pada perwakilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).⁷ Selain itu wawancara individu juga dilakukan pada perwakilan aparatur desa dan Kader SEPEDA KEREN dari perwakilan desa wilayah ujicoba, dan perwakilan Mentor SEPEDA KEREN. FGD pada mentor dan kader tidak dilakukan karena keterbatasan akses jaringan selular dan internet di area Trenggalek.

Keberimbangan komposisi gender untuk pemilihan informan telah direncanakan pada awal pendokumentasian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, komposisi informan laki-laki hanya 25% dibandingkan informan perempuan, terutama pada pelaksana kegiatan dan kader di desa. Pelaksana

⁷ wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Trenggalek hanya dilakukan dengan Dinsos P3A dan Dinas PMD. Kesulitan untuk wawancara lebih disebabkan oleh pandemi Covid, yang mengakibatkan kegiatan OPD ditutup sementara dan pejabat fokus pada upaya penanganan kondisi tersebut.

kegiatan ini adalah mentor, jumlah mentor perempuan lebih banyak dibandingkan mentor laki-laki. Demikian pula pada kader, persepsi kegiatan ini untuk perempuan dan kelompok rentan, menyebabkan hampir semua Kader SEPEDA KEREN adalah perempuan.

Triangulasi data untuk konsistensi dan validitas data dilakukan pada bulan Januari 2021 dengan cara: 1) memeriksa silang hasil wawancara/DKT informan satu dan informan lain; 2) memeriksa hasil wawancara/DKT dengan data sekunder yang relevan. Analisis data sekunder dilakukan secara simultan mulai Januari sampai Juli 2021. Data sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan artikel yang relevan, data statistik BPS, peraturan terkait pembangunan inklusif, dan laporan kegiatan SEPEDA KEREN. Pendokumentasian ini juga memperoleh data perkembangan kegiatan SEPEDA KEREN yang dilakukan sampai bulan Juli 2021. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Trenggalek pada paruh pertama tahun 2021 dalam melaksanakan kegiatan SEPEDA KEREN.

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL DAN ANALISIS

Pendokumentasian ini menggunakan beberapa konsep terkait dengan pemberdayaan kelompok rentan yang mendorong pembangunan inklusif, antara lain:

Kelompok Rentan. Program SEPEDA KEREN mendefinisikan kelompok rentan untuk konteks Kabupaten Trenggalek sebagai “setiap orang yang karena kerentanannya berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan berkenaan dengan kekhususannya, yang terdiri dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya, misalnya korban bencana alam, mantan pekerja migran Indonesia”.⁸

Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan, dengan memastikan adanya mekanisme partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian bahwa masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan. **Pendekatan partisipatif** dalam pembangunan menjamin adanya pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan secara penuh dan meningkatkan kapasitasnya, dan mendorong hasil yang berkeadilan, tepat sasaran yang berpihak pada kelompok marjinal.⁹

Inklusi sosial dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas, kesempatan dan martabat orang-orang yang selama ini dirugikan atas dasar identitas mereka untuk ikut ambil bagian dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan inklusif mendorong terciptanya pola pembangunan yang terbuka, ramah pada kelompok rentan, meniadakan hambatan setiap warga masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Ketika semua pihak mendapatkan pemahaman nilai-nilai inklusif diharapkan mereka akan membuat kemajuan untuk kehidupannya, mengidentifikasi hambatan dan memikirkan alternatif penyelesaiannya.

⁸ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

⁹ Willy Daeli dkk. 2017. Dari Partisipasi ke Inklusi: Pembelajaran dari desain dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Center for International Forestry Research, <http://www.jstor.com/stable/resrep16223> diakses tanggal 16 Desember 2020.

¹⁰ KOMPAS GESI Strategy 2018-2022.

Kepemimpinan transformatif kelompok rentan merupakan kemampuan individu untuk memengaruhi, menggerakkan, mentransformasi nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial, terlibat dalam pengambilan keputusan dan dipercaya untuk menjalankan aspirasi masyarakat (khususnya kelompok rentan) untuk kehidupan yang lebih setara dan adil. SEPEDA KEREN mendorong munculnya kepemimpinan kelompok rentan yang dimulai oleh kader dalam mengorganisir kegiatan SEPEDA KEREN di desa dan melakukan pemberdayaan kelompok rentan di desa.

Analisis pendokumentasian ini merujuk pada kerangka strategi GESI KOMPAK.¹¹ Strategi GESI KOMPAK berfokus pada program untuk mendukung masyarakat miskin dan terpinggirkan (kelompok rentan) melalui pemahaman yang lebih baik tentang hambatan dan kondisi yang dihadapi oleh mereka, melakukan intervensi untuk mengatasi hambatan, kondisi dan kebutuhan kelompok rentan atas pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal, dan berbagi pembelajaran dan pengetahuan tentang praktik GESI dengan pemerintah, serta replikasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk itu KOMPAK menggunakan pendekatan jalur ganda (twin-track) secara bersamaan, yaitu:

1. **Pengarusutamaan GESI**, sebagai bagian integral dari seluruh proses program KOMPAK. Pengarusutamaan menitik beratkan pada analisis identifikasi yang terintegrasi dalam semua tahapan pada siklus perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Pengarusutamaan GESI diintegrasikan dalam kegiatan KOMPAK, diantaranya melalui: mendorong perwakilan kelompok rentan untuk proses perencanaan pembangunan desa yang inklusif, peningkatan kapasitas kelompok rentan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa), pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yang inklusif, peningkatan akses layanan dan kebutuhan dasar untuk kelompok perempuan, anak, masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
2. **Kegiatan terfokus** bertujuan mengatasi ketidaksetaraan, ketidakadilan dan melakukan intervensi tertentu yang hasilnya dapat direplikasi atau berguna bagi program di masa mendatang. Intervensi khusus dilakukan untuk memastikan kelompok rentan mengakses layanan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Desain intervensi khusus ini disesuaikan dengan masing-masing kelompok yang ingin dijangkau. Contoh intervensi khusus GESI yaitu meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan, misalnya Akademi Paradigta yang pesertanya adalah perempuan di desa baik kader desa, masyarakat umum dan perangkat desa perempuan termasuk PKK, yang berkontribusi untuk kepemimpinan perempuan yang memiliki pengaruh formal dalam pembangunan desa yang inklusif yang selama ini masih minim.

Pembelajaran dari intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh KOMPAK sebelumnya, misalnya kegiatan Akademi Paradigta dan Sekar Desa, menjadi modal bagi KOMPAK untuk mendorong Pemda Trenggalek mengembangkan tata kelola inklusif di level masyarakat, sesuai konteks kebutuhan di Kabupaten Trenggalek, yaitu isu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Sehingga analisis pendokumentasian ini berfokus pada:

¹¹ KOMPAK GESI Strategy 2018-2022.

- a. Desain dan pelaksanaan SEPEDA KEREN, termasuk pelaku yang terlibat di dalamnya.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program, yaitu: regulasi, dukungan institusi dan anggaran, kapasitas dan pengetahuan pelaku SEPEDA KEREN, dan dampak pandemi COVID-19 pada program.
- c. Praktik baik sebagai pembelajaran, termasuk perubahan yang terjadi pada pelaku dan beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan.
 - Untuk melihat perubahan yang terjadi pada pelaku SEPEDA KEREN, utamanya kader sebagai penggerak perubahan di desa, penulis menggunakan Kerangka Perubahan Bennet yang membagi perubahan menjadi 5 level yaitu:¹²
 - Level manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan SEPEDA KEREN, yaitu mendapatkan informasi, banyak teman, kenal dengan mentor, kenal dengan pejabat, mendapatkan bimbingan, menambah wawasan.
 - Level perubahan praktis dan reaksi terhadap program, misalnya merasa senang, merasa percaya diri, antusias, terbuka, mau belajar.
 - Level perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan dan aspirasi, misalnya setelah mengikuti kegiatan SEPEDA KEREN, terjadi perubahan kesadaran, pengetahuan yang mendalam, sikap, motivasi, berani menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi, dan perubahan keterampilan. Perubahan di level ini merupakan perubahan jangka pendek.
 - Level perubahan kebijakan, praktik, ide dan perilaku, misalnya terjadi perubahan perilaku, praktik kebiasaan dan strategi, perubahan kebijakan dan prosedur, dan anggaran.
 - Perubahan situasi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan adalah perubahan level tertinggi dan merupakan capaian jangka panjang, di mana semua elemen dan lingkungan mendukung adanya tata kelola pembangunan daerah yang inklusif mulai dari level desa sampai kabupaten.

Sesuai dengan kerangka perubahan Bennet, semakin tinggi level perubahan, jumlah perubahan semakin sedikit, tetapi kapasitas kader semakin kuat untuk melakukan kontrol atas aspek kunci kehidupan mereka. Kader juga lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas dan mengakses serta mengontrol sumber daya yang berharga untuk perubahan sosial.

GAMBAR 1. KERANGKA PERUBAHAN BENNET



¹² Yohanes da Masenus Arus dkk. 2018. Content Analysis of the Most Significant Change Dataset Program MAMPU, Circle Indonesia dan MAMPU.

2.3. Beberapa Keterbatasan

Pendokumentasian ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19, sehingga pengumpulan data dilakukan secara daring yang membawa beberapa konsekuensi, yaitu:

- a. Akses untuk mendapatkan informasi penting dari pihak Pemda Trenggalek sulit dilakukan karena pembatasan sosial, prioritas OPD yang fokus pada penanganan pandemi dan beberapa pihak OPD yang terinfeksi oleh virus COVID-19.
- b. Akses wawancara pada informan di level desa, baik pada kader dan pemerintah desa beberapa kali mengalami kendala jaringan seluler, sehingga beberapa perlu menjadwalkan ulang dan sebagian tidak bisa diwawancarai.
- c. Tidak dapat melakukan observasi secara langsung, misalnya pertemuan kader di desa dan pertemuan yang mendiskusikan RTL pelatihan kader.
- d. Akses pada dokumen sekunder. Adanya kesulitan mengandalkan pengiriman dokumen pendukung dari informan, dibandingkan jika proses pendokumentasian ini mencari langsung di lapangan. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk analisis, seperti laporan kegiatan SEPEDA KEREN baru diperoleh pada bulan Juli 2021.

Untuk mengurangi dampak keterbatasan tersebut, penulis melakukan pendalaman data pada beberapa informan pada bulan Januari-Februari 2021, berdiskusi dengan KOMPAK, dan menganalisis data sekunder yang telah diperoleh.

Bab 3.

TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SEPEDA KEREN

3.1 KONTEKS LOKASI PELAKSANAAN SEPEDA KEREN

Dampak pembangunan daerah yang kurang memberikan suara pada kelompok marjinal mengakibatkan permasalahan sosial, ekonomi dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam politik, baik pada proses pengambilan keputusan di desa dan untuk menduduki posisi strategis dalam struktur formal pemerintahan.

Di Kabupaten Trenggalek tingginya kerentanan sosial dapat dilihat dari jumlah penerima Bansos pada tahun 2019 sebesar 54.712 KK. Angka kemiskinan di Trenggalek adalah 10,98% atau sedikit lebih tinggi daripada angka kemiskinan rata-rata di Jawa Timur sebesar 10,20%. Dari sisi pendidikan, umumnya warga Trenggalek merupakan lulusan SMP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten ini adalah sebesar 69,46 atau lebih rendah dari rata-rata IPM Jawa Timur sebesar 71,50.¹³ Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek tahun 2018 cukup bagus yaitu 92,52¹⁴, akan tetapi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur dari peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, nilainya masih rendah, yaitu 65,21.¹⁵

Selain itu masih belum optimalnya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ditandai dengan persentase cakupan layanan bagi korban sebesar 71,6%. Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dari indikator perolehan hasil Kabupaten Layak Anak (KLA) sebesar 700 dari nilai maksimal 1000. Di Trenggalek masih banyak ditemui praktik perkawinan anak usia 10-16 tahun yaitu dengan persentase 22,69% pada 2016. Dukungan pada anak dan lansia terlantar belum maksimal. Hal ini dikuatkan dengan jumlah anak terlantar 19.633 baik yang dirawat di panti dan pada keluarga miskin, sedangkan jumlah lansia terlantar pada tahun 2016 adalah 3.868 orang. Demikian pula masih kurangnya upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Dari sejumlah 4.798 penyandang disabilitas yang sudah didampingi melalui program rehabilitasi, hanya 23,45% yang mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya. Kelompok rentan lainnya adalah pekerja migran, yang umumnya bekerja di sektor informal karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan.¹⁶

¹³ Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2020; Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020.

¹⁴ <https://jatim.bps.go.id/indicator/40/176/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html> diakses tanggal 15 Desember 2020.

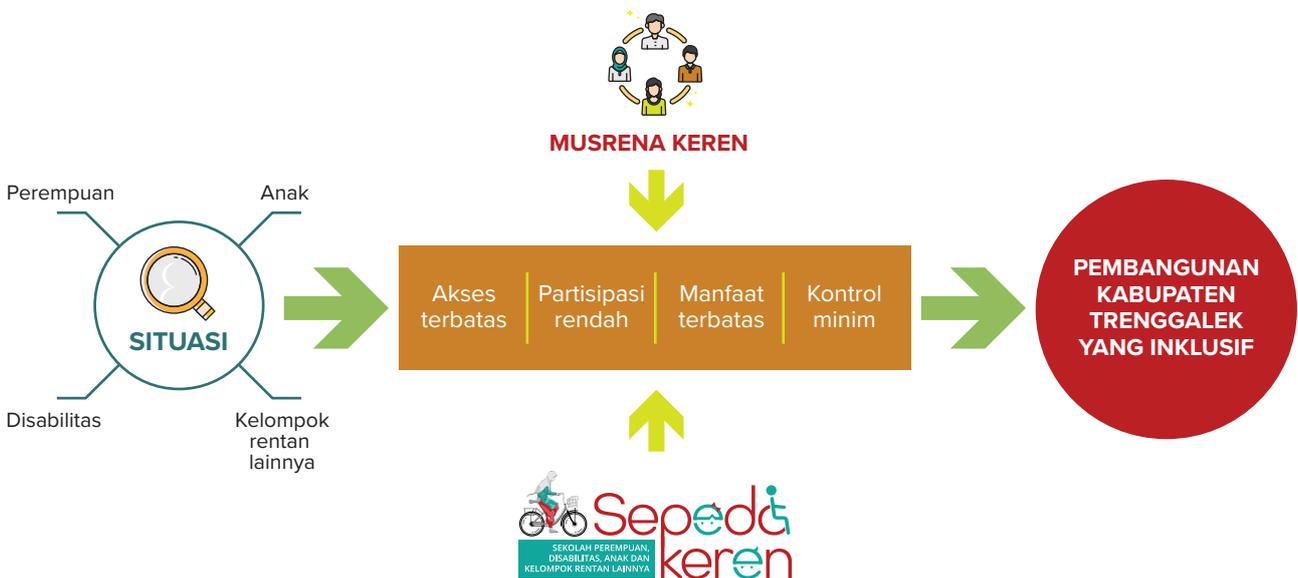
¹⁵ <https://jatim.bps.go.id/indicator/40/177/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html> diakses tanggal 15 Desember 2020.

¹⁶ Petunjuk Teknis SEPEDA KEREN, 2019; <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/06/09/465/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota-2009-2016-.html> diakses pada 20 Desember 2020.

RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021 menyatakan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, dan sejahtera. Untuk mendorong pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek, terdapat dua misi pemerintah daerah yang terkait yaitu meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak dengan tujuan peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan (misi kelima) dan meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (misi ketujuh).¹⁷ Misi pembangunan Kabupaten Trenggalek tersebut disusun berdasarkan realitas bahwa keterlibatan kelompok rentan seperti ekonomi prasejahtera (miskin), perempuan, penyandang disabilitas, anak, korban kekerasan dan bencana dan lain sebagainya dalam proses pembangunan masih belum memadai.¹⁸

Intervensi Program KOMPAK dengan pendekatan GESI di Kabupaten Trenggalek yang dilakukan oleh KOMPAK dan mitra strategisnya, telah menghasilkan beberapa hal seperti perubahan perspektif pemerintah daerah mengenai pembangunan yang lebih partisipatif, adanya gender champion¹⁹ di lingkungan OPD di Pemda Trenggalek, terutama OPD yang membawahi sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, munculnya kader perempuan di desa dampingan PEKKA dan FITRA serta adanya akses pada layanan dasar (misalnya adminduk di desa yang lebih memfasilitasi kelompok rentan). Selain itu, KOMPAK juga memfasilitasi forum belajar antar pemda di wilayah kerja KOMPAK. Misalnya adalah Forum Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) dari Aceh telah mendorong Pemda Trenggalek untuk mengadopsi ide tersebut dengan membentuk Musrena Keren.

GAMBAR 2. BAGAN SEPEDA KEREN DAN MUSRENA KEREN UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF



Sumber: Modul SEPEDA KEREN, 2019, wawancara Dinsos P3A dan FGD OMS, 2020.

¹⁷ Petunjuk Teknis SEPEDA KEREN, 2019; RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021.

¹⁸ Petunjuk Teknis SEPEDA KEREN, 2019.

¹⁹ Gender champion adalah individu (baik perempuan atau laki-laki) yang memiliki komitmen untuk kesetaraan dan keadilan gender di lingkungannya. Mereka memperjuangkan hak perempuan dan kelompok rentan, dan pemberdayaannya. Untuk tujuan tersebut, mereka akan bekerja sama dengan berbagai pihak. (definisi ini disarikan dari beberapa regulasi daerah tentang penetapan Pokja Gender dan PUG)

Adopsi Musrena di Aceh oleh Pemda Trenggalek menjadi Musrena Keren di Kabupaten Trenggalek didasarkan pada kondisi masih belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan mereka dalam forum perencanaan pembangunan dan kapasitasnya. Musrena Keren memfasilitasi usulan-usulan kelompok rentan untuk disampaikan dalam Musrenbang reguler sebagai dasar penyusunan rencana kerja pembangunan.

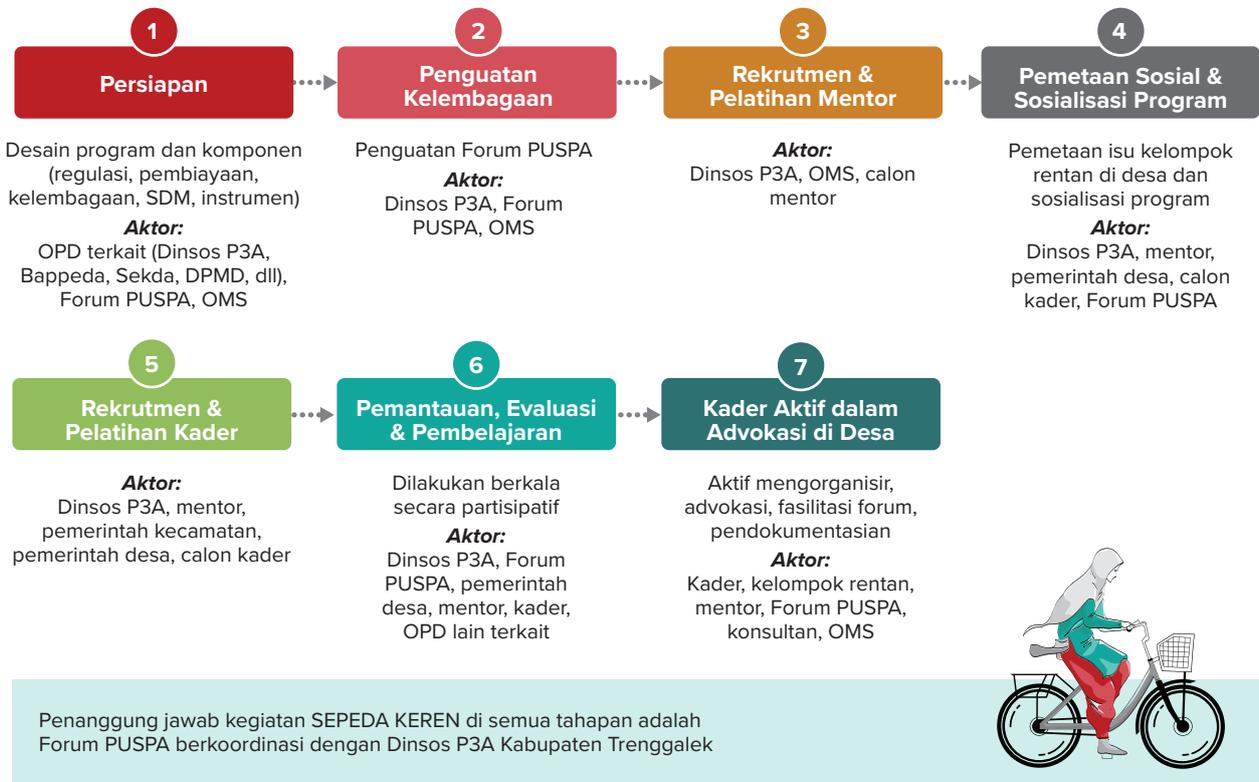
Sejak dilakukannya Musrena Keren mulai tahun 2018, secara kuantitas kehadiran kelompok rentan dalam Musrena Keren meningkat jumlahnya²⁰, namun kapasitas mereka untuk menyusun usulan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan menyuarakannya masih kurang. Misalnya, usulan kebutuhan kelompok rentan masih ditentukan oleh desa yang lebih fokus pada kebutuhan praktis dan sifatnya *charity* (bantuan), kehadiran mereka juga cenderung bersifat memenuhi prosedur arahan Pemda untuk melaksanakan Musrena Keren. Untuk melakukan perubahan pada kapasitas kader desa dan kelompok rentan, diperlukan metode penguatan yang komprehensif mulai level desa di Kabupaten Trenggalek.

SEPEDA KEREN menyiapkan kader kelompok rentan untuk mengenali dirinya, peran dan hak mereka dalam pembangunan, bagaimana mengakses serta berpartisipasi untuk mendapatkan manfaat dan mengontrol pembangunan. Proses transformasi ini meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam forum pembangunan, dengan kemampuan menyusun usulan yang didasari oleh kesadaran pemenuhan kebutuhan mereka dan mengadvokasinya. Kader SEPEDA KEREN yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terlibat dalam memfasilitasi pelaksanaan Musrena Keren di tingkat desa, mewakili dan mendampingi kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga mereka mampu melakukan pengawalan usulan kelompok rentan agar diakomodir dalam rencana kerja pembangunan. Dengan demikian, Musrena Keren dan SEPEDA KEREN merupakan inisiatif dua sisi yaitu menyediakan ruang partisipasi bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan secara berjenjang, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk dapat melakukan advokasi kebijakan yang berpihak. Dalam jangka panjang mereka akan berkontribusi untuk pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek.

²⁰ Jumlah kehadiran kelompok rentan pada forum meningkat diperoleh dari wawancara dengan informan Pemda, Pemdes, dan kader, namun angka peningkatan kehadiran tidak ada informasi formal.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN SEPEDA KEREN

Tahapan pelaksanaan SEPEDA KEREN di Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 3. TAHAPAN PELAKSANAAN SEPEDA KEREN

Sumber: Petunjuk Teknis SEPEDA KEREN, 2019; wawancara KOMPAK Jawa Timur, 2020; DKT dan wawancara Konsorsium OMS, 2020; wawancara Mentor SEPEDA KEREN, 2020; wawancara Kader SEPEDA KEREN, 2020.

3.2.1 Persiapan

Kegiatan utama dalam tahap persiapan adalah diskusi desain program untuk menentukan kerangka kerja dan komponennya.

Diskusi Awal

Langkah awal tahapan ini adalah Dinsos P3A bertemu dengan Bupati dan istri Bupati yang merupakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten untuk mendapatkan dukungan kegiatan dan strateginya di tahun 2019. Dinsos P3A dan Tim Penggerak PKK kabupaten melakukan kunjungan belajar pada dua sekolah komunitas untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik yang dikembangkan oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan dan yang dikelola oleh PEKKA di Kabupaten Kubu Raya. Dalam kunjungan tersebut dipelajari bahwa pendekatan untuk perubahan dimulai dari pemberdayaan kader komunitas di desa yang dilakukan oleh mentor, yang melahirkan kepemimpinan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam forum formal pemerintah dan membangun kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kunjungan belajar tersebut, Pemda Trenggalek meluaskan isu peningkatan kapasitas tidak hanya pada perempuan, tetapi juga pada kelompok rentan lainnya, sesuai kebutuhan daerah. Inovasi ini dikenal dengan SEPEDA KEREN, yang melengkapi adanya Musrena Keren.

Pemda Trenggalek didukung oleh KOMPAK bekerja sama dengan Konsorsium OMS (anggota telah disebutkan di bagian sebelumnya) yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur untuk mendesain program berdasarkan pengalaman mereka bekerja dengan kelompok rentan. Keragaman pengalaman OMS bekerja dengan kelompok rentan merupakan aset penting program ini untuk dikembangkan dan digunakan bagi proses pemberdayaan kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek.

Diskusi awal dilakukan antara Pemda Kabupaten Trenggalek (Bupati, Dinsos P3A, Bappeda dan OPD lain terkait seperti DPMD), Program KOMPAK, Konsorsium OMS, dan Forum PUSPA. Penanggung jawab proses ini adalah Dinsos P3A difasilitasi oleh Program KOMPAK. Pertemuan awal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai program yang dilakukan, harapan, dan juga memetakan pihak penting lainnya yang perlu dilibatkan. Diskusi mengenai kesetaraan gender dan inklusi sosial juga dilakukan, agar semua pihak memiliki perspektif yang sama dalam merancang dan melaksanakan program.

Diskusi Desain SEPEDA KEREN

Dalam kegiatan ini, peserta yang terlibat sama dengan pada diskusi awal. Desain program dilakukan secara partisipatif dan semua peserta memiliki posisi setara untuk berbagi pengalaman, metode kerja, menyampaikan pendapat dan memberikan persetujuan konsep serta arah program. Proses yang partisipatif dipandu oleh konsultan ahli, melahirkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada semua pihak yang terlibat dalam desain SEPEDA KEREN bahwa kegiatan ini merupakan milik bersama. Pada saat bersamaan proses ini juga memberikan penguatan pada Pemda Trenggalek dan Forum PUSPA untuk memfasilitasi, menentukan tujuan dan memilih model yang tepat untuk pelaksanaan SEPEDA KEREN. Sehingga dalam proses ini terjadi transfer pengetahuan pada Pemda Trenggalek dan Forum PUSPA.

Proses diskusi desain SEPEDA KEREN menyepakati beberapa hal antara lain:

- a. Visi, misi dan tujuan SEPEDA KEREN (detil di lampiran 1).
- b. Kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, yaitu:
 - Regulasi sebagai payung pelaksanaan dan acuan dalam penganggaran pelaksanaannya.
 - Pembiayaan kegiatan.
 - Kelembagaan yang menaungi SEPEDA KEREN sebagai inovasi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, termasuk strukturnya.
 - Sumber daya manusia (SDM) pelaksana kegiatan.
 - Instrumen panduan pelaksanaan kegiatan.
 - Waktu pelaksanaan, indikator capaian akhir SEPEDA KEREN yang perlu diturunkan dalam capaian tahunan, lokasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - Program SEPEDA KEREN dilakukan dalam waktu 5 tahun mulai tahun 2019 sampai 2024. Tahun pertama merupakan masa persiapan dan menyiapkan mentor, pada tahun kedua dilakukan uji coba pelaksanaan kegiatan di desa. Pemilihan desa yang menjadi lokasi uji coba ditetapkan berdasarkan: 1) analisis data kerentanan penduduk (terutama tingkat

kemiskinan) dengan fokus pada perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya; 2) hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek; dan 3) penjangkaran usulan kecamatan dan desa.

Tahap uji coba kegiatan dilakukan di 5 kecamatan dengan mengambil 3 desa dari tiap kecamatan, sehingga total desa ujicoba adalah 15 desa. Desa lokasi uji coba program merupakan desa dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Trenggalek.

Penambahan kelas SEPEDA KEREN dilakukan secara simultan setelah tahapan uji coba di 15 desa.

Menentukan Komponen SEPEDA KEREN

Dari kerangka kerja yang disepakati, kemudian diturunkan ke dalam komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan SEPEDA KEREN, yaitu:

a. **Komponen Regulasi**

Kebijakan yang digunakan oleh SEPEDA KEREN ini adalah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 tahun 2019 tentang Musrena Keren. Keputusan menggunakan regulasi ini karena SEPEDA KEREN berkaitan erat dengan Musrena Keren terutama partisipasi aktif kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Perbup Musrena Keren menjadi penguat bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam menyuarkan kebutuhannya pada forum khusus perencanaan pembangunan.

b. **Komponen Pembiayaan**

Memastikan pembiayaan dari lintas sektor, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pihak swasta, dan hibah yang tidak mengikat. Pembiayaan meliputi biaya operasional, implementasi, pemantauan dan evaluasi program. Pada tahun pertama dan kedua, APBD Kabupaten mendukung pembiayaan tahun 2019 untuk persiapan dan 2020 untuk pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN.

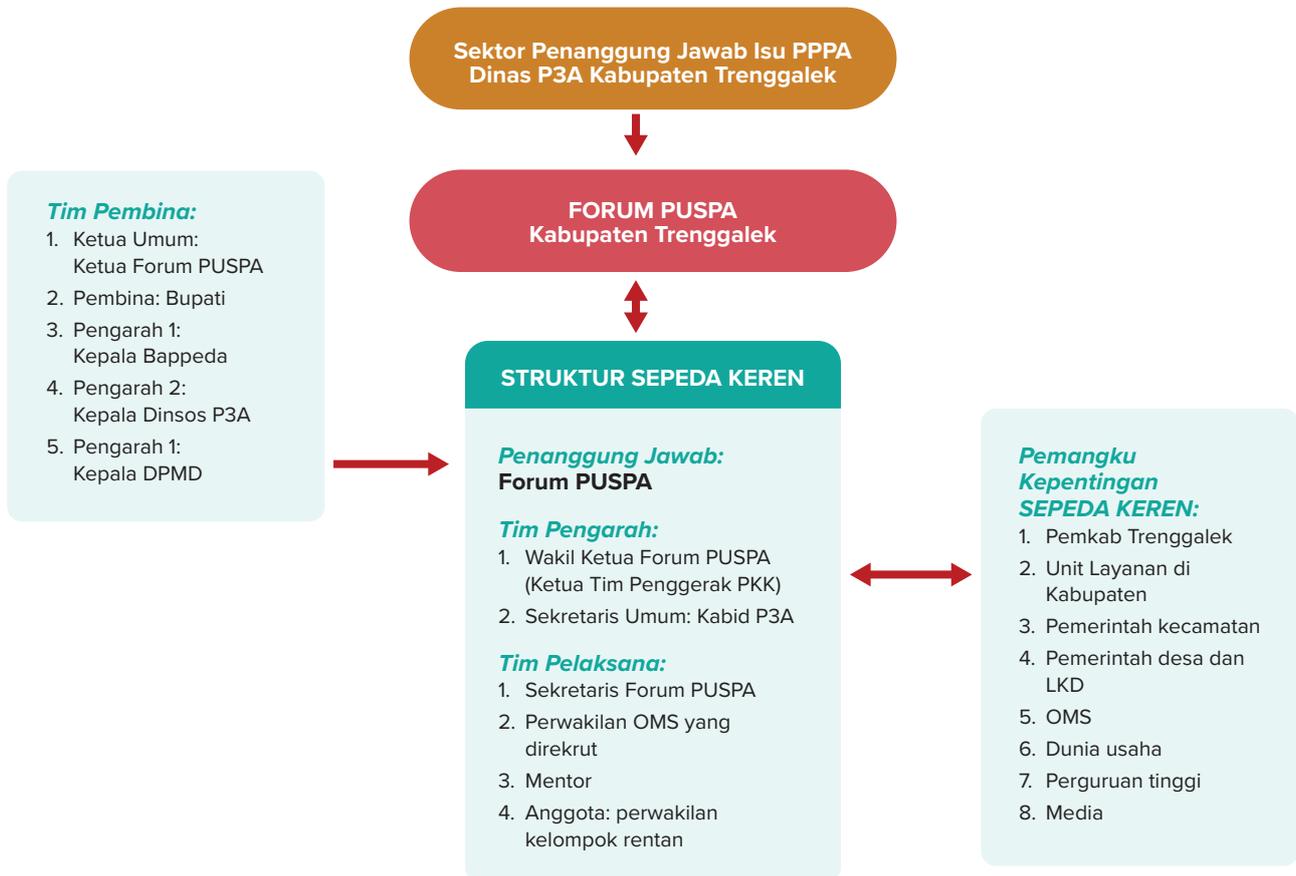
c. **Komponen Kelembagaan**

Forum PUSPA merupakan wadah bersinergi bagi lembaga dan pihak yang memiliki kepedulian pada perempuan dan anak, mitra pemerintah dalam mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat terkait program PPPA.²¹ Peran-peran tersebut menjadi pertimbangan Pemda Kabupaten Trenggalek untuk memutuskan Forum PUSPA sebagai lembaga penanggung jawab SEPEDA KEREN melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/422/406.001.3/2019 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) pada 20 Mei 2019. Keputusan ini juga menguatkan kelembagaan dan revitalisasi peran Forum PUSPA di Kabupaten Trenggalek, karena keberadaannya sudah ada sebelum

²¹ Kementerian PPPA pada tahun 2017 menginstruksikan pembentukan Forum PUSPA di 34 provinsi, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota sebagai amanah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU TPPO. Forum ini dibentuk untuk mempercepat pengakhiran kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2109/pemerintah-percepat-kesejahteraan-perempuan-dan-anak-melalui-puspa>; <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2381/kemen-pppa-dorong-kabupaten-kota-membuat-rencana-aksi-puspa> dan <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1745/mari-lindungi-perempuan-dan-anak-melalui-sinergi-masyarakat>

kegiatan SEPEDA KEREN. Hadirnya SEPEDA KEREN dapat dilihat sebagai salah satu kegiatan untuk menguatkan fungsi Forum PUSPA sebagai wadah bersinergi multipihak yang memiliki kepedulian dan komitmen pada kesejahteraan perempuan dan anak melalui koordinasi yang terstruktur dan setiap pemangku kepentingan berkontribusi sesuai perannya masing-masing (gambar 4).

GAMBAR 4. STRUKTUR KELEMBAGAAN SEPEDA KEREN KABUPATEN TRENGGALEK



Sumber: Juknis SEPEDA KEREN, 2019; wawancara OMS dan Dinsos P3A Kab. Trenggalek, 2020.

Unsur pemangku kepentingan yang terlibat untuk mendukung kesuksesan kegiatan adalah pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media. Peran masing-masing pemangku kepentingan dalam Program SEPEDA KEREN disampaikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

TABEL 2. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM SEPEDA KEREN

NO	NAMA PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN
1	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan payung hukum pelaksanaan. • Menyediakan anggaran. • Memberi layanan pada kelompok rentan sampai tingkat desa. • Berkoordinasi untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
2	Unit Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendekatkan dan memberikan pelayanan bagi kelompok rentan. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
3	Pemerintah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan nama mentor. • Menginformasikan ke peserta musrenbang kecamatan hasil Musrena Keren Kecamatan yaitu daftar prioritas usulan-usulan yang belum dianggarkan oleh desa dan akan dibawa ke musrenbang kabupaten. • Memfasilitasi dan mendampingi Kader SEPEDA KEREN dalam musrenbang kabupaten. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
4	Pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan nama calon kader. • Mengakomodasi hasil Musrena Keren ke dalam musdes dan musrenbangdes. • Mengalokasikan anggaran desa terhadap usulan Musrena Keren dalam APBDes. • Memfasilitasi dan mendampingi kader dalam musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten.
5	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu membangun jaringan ke sumber layanan bagi kelompok rentan untuk pemenuhan kebutuhannya. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
6	OMS	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi ToT mentor. • Mendampingi proses fasilitasi Musrena Keren. • Memberikan masukan selama proses pendampingan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh kader. • Membantu membangun jaringan ke sumber pelayanan bagi kelompok rentan untuk pemenuhan kebutuhannya. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
7	Dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SEPEDA KEREN. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
8	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perbaikan kualitas pelaksanaan SEPEDA KEREN. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.
9	Media	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan materi dan fasilitasi pelatihan jurnalisisme warga. • Membantu publikasi karya jurnalis warga dan pelaksanaan SEPEDA KEREN. • Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi.

Sumber: Petunjuk Teknis SEPEDA KEREN, 2019

Sesuai dengan tabel 2, aktor yang memiliki peran langsung dalam menentukan kualitas pelaksanaan dan keberhasilan SEPEDA KEREN adalah pemerintah daerah (termasuk Dinsos P3A, Bappeda, DPMD, dan OPD lain terkait), Forum PUSPA, mentor, kader sebagai penggerak di desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.

Penguatan pada Forum PUSPA dilakukan oleh Dinsos P3A dan Konsorsium OMS bersamaan dengan pelaksanaan diskusi desain SEPEDA KEREN di tahun 2019, yang juga dihadiri oleh OMS lokal sebagai jaringan kerja Forum PUSPA, seperti LPA Trenggalek, 'Aisyiyah, dan Fatayat. Semua peserta yang hadir mendiskusikan tujuan, model penguatan pada kelompok rentan, dan pendekatan yang digunakan. Dalam pertemuan tersebut terdapat proses pertukaran pengetahuan, peningkatan pengetahuan terhadap isu, dan dukungan bagi pelaksanaan SEPEDA KEREN pada OMS yang menjadi jaringan kerja Forum PUSPA.

- d. **Komponen instrumen panduan pelaksanaan program** meliputi petunjuk teknis pelaksanaan program, modul pelatihan mentor dan kader, dan panduan pemantauan, evaluasi dan pembelajaran dengan pendekatan partisipatif dan inklusif.

Modul pelatihan disusun sebagai panduan pelatihan bagi mentor dan kader. Tujuan dari isi modul pelatihan ini adalah membekali mentor dalam membongkar kesadaran individu, posisi dan perannya dalam masyarakat, menyadari hak, kewajiban dan perannya dalam pembangunan. Metode pembelajaran pelatihan bagi mentor adalah pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Metode pembelajaran di luar kelas dilakukan dengan memberikan penugasan untuk menyusun rencana dan praktik pengorganisasian komunitas, paparan hasil penugasan, dan evaluasi yang bersifat reflektif atas proses pelatihan serta materi pelatihan.

TABEL 3. MODUL SEPEDA KEREN

POKOK BAHASAN	ISI BAHASAN
Bina Suasana dan Orientasi Belajar	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan tujuan pembelajaran, metode dan harapan peserta. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran untuk orang dewasa dengan cara yang kreatif dan partisipatif, sehingga mampu mengungkap pengalaman kelompok rentan, memudahkan pemahaman, membuka ruang dialog dan kesadaran kritis.
SEPEDA KEREN	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman tentang program meliputi prinsip-prinsip, visi misi dan tujuan program, kelompok rentan, tugas dan peran mentor.
Fitrah Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Menggali perspektif tentang diri sebagai individu, peran individu dan peran sosial, pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas.
Gender dan Inklusi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Membangun pemahaman dan keyakinan mengenai kesetaraan dan keadilan gender, kebutuhan praktis dan strategis, pentingnya pengarusutamaan gender, konsep mengenai inklusi dan eksklusif sosial, dan membangun dukungan bagi kelompok rentan.
Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Disabilitas dan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> Mengajak peserta untuk menyadari dan merefleksikan konsep dan penerapan hak asasi manusia, yang di dalamnya terdapat jaminan hak perempuan, disabilitas dan anak.
Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Mengajak peserta untuk memahami kebijakan pembangunan yang inklusif, prinsip inklusivitas dalam pembangunan di desa dan daerah, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan, dan mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat atas pembangunan di daerahnya.

POKOK BAHASAN	ISI BAHASAN
Pengorganisasian Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih peserta mengenai pengorganisasian mulai konsep, metode dan teknik fasilitasi dan komunikasi dalam pengorganisasian.
Analisis Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih peserta mengenai analisis sosial dan alat untuk melakukan analisis sosial, kemudian menghubungkan dengan kepekaan melakukan analisis sosial untuk kelompok rentan.
Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih peserta agar mampu menjadi pelaku advokasi dan mengorganisir untuk perubahan sosial.
Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong munculnya kepemimpinan di level lokal dan pada kelompok rentan sebagai pelaku perubahan sosial bagi kehidupannya.

Sumber: Modul SEPEDA KEREN, 2019

Panduan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran²² merupakan acuan melakukan pemantauan dan evaluasi SEPEDA KEREN dengan prinsip partisipatif dan inklusif. Prinsip partisipatif dan inklusif berarti semua pemangku kepentingan dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi program.

Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah Pemda Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari Dinsos P3A, OPD lain terkait (Sekretariat Daerah/Sekda, Bappeda, DPMD, Inspektorat, dan lintas sektor terkait), kecamatan, Forum PUSPA sebagai penanggung jawab program, mentor dan kader sebagai pelaksana program, pemerintah desa dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat.

Panduan ini membantu mengarahkan proses pemantauan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kemajuan program dan hambatan dalam periode waktu tertentu, sedangkan dalam proses evaluasi, panduan ini membantu mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melihat efektivitas program, apakah program sudah mencapai sasaran dan mendapatkan pembelajaran untuk perbaikan maupun pengembangan inovasi. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini melakukan analisis pemantauan dan evaluasi secara obyektif. Hasil dari proses ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

3.2.2 Rekrutmen dan Pelatihan Mentor SEPEDA KEREN

Dinsos P3A sebagai penanggung jawab proses rekrutmen Mentor SEPEDA KEREN secara terbuka dengan memberikan beberapa persyaratan. Syarat bagi pelamar adalah memiliki pengalaman bekerja untuk pemberdayaan masyarakat, memahami isu pembangunan daerah di Trenggalek dan komitmen memajukan masyarakat Trenggalek khususnya kelompok rentan, memahami perspektif gender dan hak anak, memiliki jiwa kerelawanan, serta berdomisili di Kabupaten Trenggalek.²³

Persyaratan ini berkaitan dengan tugas mentor untuk memfasilitasi dan mendampingi Kader SEPEDA KEREN. Tugas mentor adalah terlibat dalam rekrutmen kader, melatih kader melalui penyampaian materi yang bersumber dari modul pelatihan mentor ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh kader, mendorong kesadaran kritis kader dengan memberikan pendampingan intensif secara reguler, melakukan pemantauan dan evaluasi, menulis laporan pelaksanaan SEPEDA KEREN di wilayah tugasnya, dan memfasilitasi Musrena Keren di level desa, kecamatan dan kabupaten.

²² Sampai pertengahan 2021, panduan pemantauan dan evaluasi program masih disusun secara partisipatif oleh KOMPAK, Pemda Kabupaten Trenggalek dan Konsorsium OMS.

²³ Domisili pelamar posisi mentor adalah di kabupaten Trenggalek dan tidak harus berasal dari desa dan kecamatan lokasi program.

Calon mentor yang lolos seleksi selanjutnya mengikuti pelatihan Mentor SEPEDA KEREN yang dilaksanakan oleh Dinsos P3A didukung oleh Program KOMPAK. Fasilitator pelatihan ini adalah perwakilan Konsorsium OMS. Pelatihan bagi mentor menggunakan modul yang telah disusun untuk memperkaya pemahaman terhadap program, membongkar perspektif kesetaraan gender dan pemahaman tentang kelompok rentan dengan pendekatan hak asasi manusia dan perspektif GESI, menajamkan pengetahuan dan komitmen bekerja dengan kelompok rentan, mempelajari teknik dan metode bekerja partisipatif.

Metode pembelajaran dilakukan selama 7 hari, yaitu 5 hari di dalam kelas, 1 hari di luar kelas dan 1 hari melakukan presentasi penugasan serta refleksi dan evaluasi. Pembelajaran di luar kelas dilakukan dengan memberikan penugasan praktik pengorganisasian secara berkelompok pada hari ke-6. Selanjutnya setiap kelompok memaparkan hasil penugasan tersebut di kelas. Presentasi setiap kelompok didiskusikan secara reflektif oleh semua peserta dipandu fasilitator. Pada hari terakhir tersebut juga dilakukan satu sesi *role play* atau bermain peran dalam pelaksanaan Musrena Keren. Sesi reflektif bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah pelatihan yang dilakukan sudah mencapai sasaran dan perbaikan sesuai kebutuhan mentor untuk melakukan perannya. Selanjutnya calon mentor ditetapkan sebagai Mentor SEPEDA KEREN.

3.2.3 Sosialisasi Program dan Pemetaan Sosial di Lokasi Program

Dinsos P3A melakukan kegiatan sosialisasi program dan pemetaan sosial di kecamatan dan desa lokasi penugasan dengan melibatkan Tim PKK Kabupaten dan mentor pada akhir tahun 2019 dan di awal 2020. Pada pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan calon kader, Dinsos P3A memaparkan informasi mengenai latar belakang pentingnya program pemberdayaan kelompok rentan, kegiatan yang dilakukan di desa, manfaat dari upaya tersebut, rencana ke depan di desa lokasi program, dan dukungan dari kecamatan dan desa. Dalam kesempatan lain, sosialisasi program juga dilakukan pada kecamatan dan desa/kelurahan wilayah lain non-uji coba baik oleh Dinsos P3A dan Tim PKK Kabupaten. Metode sosialisasi SEPEDA KEREN pada umumnya adalah pertemuan formal yang mengundang pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perwakilan PKK, dan kader desa, dengan pemaparan dan diskusi mengenai program. Dalam kegiatan ini tidak dilakukan pemisahan target sasaran (pemerintah, non pemerintah/OMS, calon kader).

Sebagai rangkaian kegiatan sosialisasi, mentor melakukan pemetaan sosial dengan metode diskusi dengan pemangku kepentingan di desa, yaitu pemerintah desa, PKK, beberapa calon kader SEPEDA KEREN yang diundang oleh pemerintah desa untuk hadir. Tujuan dari pemetaan sosial awal ini adalah untuk menghasilkan informasi awal mengenai kondisi kelompok rentan di desa tersebut. Informasi ini bermanfaat bagi mentor untuk mengenal permasalahan di desa penugasan mereka dan menyusun strategi saat memfasilitasi pelatihan bagi kader dan pendampingan kader.

3.2.4 Rekrutmen dan Pelatihan Kader SEPEDA KEREN

Kader SEPEDA KEREN merupakan warga desa lokasi kegiatan, dalam pendokumentasian ini adalah warga desa lokasi uji coba. Jumlah kader dari setiap desa adalah 10 orang. Komposisi 10 orang tersebut adalah keterwakilan kelompok rentan (60%) yang terdiri dari perwakilan kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sedangkan 40% merupakan kader atau aktivis desa yang memiliki kepedulian dan komitmen memperjuangkan isu kelompok rentan dan inklusivitas, dan representasi aparatur pemerintah desa dan/atau BPD.

Peran kader mensyaratkan komitmen yang kuat bagi calon kader untuk berkontribusi pada upaya kemajuan masyarakat desa. Kader melakukan pengorganisasian komunitas, mendampingi kelompok rentan, melakukan pembelajaran dan terlibat dalam pemantauan dan evaluasi, memfasilitasi pelaksanaan Musrena Keren di desa, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten serta lembaga pemberi layanan publik, dan terlibat aktif dalam Musrenbangdes. Dengan menjalankan tugas tersebut, kader diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan di desa untuk berpartisipasi aktif, menerima dan mengelola manfaat, dan memiliki posisi kontrol dalam seluruh tahapan proses pembangunan di desa dan daerah.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas peran kader, desain SEPEDA KEREN menetapkan bahwa pelatihan kader dilakukan secara bertahap selama 6-8 bulan. Peserta pelatihan, yaitu kader dan mentor menyepakati jadwal dan waktu pembelajaran dalam rentang waktu 6-8 bulan tersebut. Penguatan bertahap ini bertujuan mendorong munculnya pemahaman yang mendalam, kesadaran kritis dan kepemimpinan lokal dari kelompok rentan. Pembelajaran yang dilakukan secara bertahap ini juga untuk memastikan bahwa visi misi SEPEDA KEREN dapat menghasilkan perubahan sosial yang terukur.

Materi pembelajaran bagi Kader SEPEDA KEREN menggunakan modul pelatihan Mentor SEPEDA KEREN.²⁴ Metode pelatihan adalah pembelajaran di dalam kelas dan penugasan berupa praktik lapangan pengorganisasian komunitas, praktik advokasi, dan diskusi hasil penugasan secara reflektif, serta sesi evaluasi pelatihan melalui cerita perubahan maupun foto bercerita (*photo voice*). Dalam materi pengorganisasian, kader memperoleh pengetahuan mengenai teknik fasilitasi dan komunikasi untuk pengorganisasian komunitas. Selain praktik lapangan untuk pengorganisasian terdapat satu sesi *role play* atau bermain peran dalam pelaksanaan Musrena Keren yang dipandu oleh mentor, sehingga kader mendapatkan gambaran situasi Musrena Keren dan strategi menyampaikan usulan.

Setelah mengikuti materi pelatihan secara lengkap, calon kader dikukuhkan sebagai Kader SEPEDA KEREN oleh SK sebagai Kader SEPEDA KEREN dari pemerintah desa masing-masing. Evaluasi proses pelatihan calon kader dilakukan oleh Forum PUSPA, mentor dan Dinsos P3A setelah pelatihan selesai, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah kegiatan yang dilakukan sudah mencapai sasaran dan perbaikan untuk kebutuhan kader yang dilakukan setelah pelatihan.

3.2.5 Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran Program SEPEDA KEREN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek dan OPD lain yang terkait, Forum PUSPA, Mentor, Kader SEPEDA KEREN, kelompok rentan sebagai penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan program dilaksanakan maksimal tiga bulan sekali dan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin untuk koordinasi kegiatan SEPEDA KEREN. Sedangkan evaluasi program dilakukan dua kali pada pertengahan periode dan akhir periode program di tahun kelima.

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah mengumpulkan informasi mengenai kemajuan dan capaian program, keterlibatan para aktor dalam SEPEDA KEREN sesuai struktur dan perannya, capaian atas indikator yang telah ditetapkan dengan menggunakan analisis skema *input* (daya dukung), *output*

²⁴ Kabid PPPA Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek menyatakan bahwa modul bagi mentor juga digunakan oleh kader, dengan pertimbangan bahwa kader diharapkan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelas SEPEDA KEREN di desanya atau desa terdekat dengan tempat tinggalnya.

(luaran), *outcome* (hasil) yang ditetapkan oleh program untuk jangka waktu lima tahun pelaksanaan program baik, dan *impact* (dampaknya).

Data pemantauan kegiatan dan capaian diperoleh dari pertemuan rutin untuk koordinasi dengan mentor dan kader, hasil kajian dengan metode survei dan studi dokumen yang dilengkapi dengan narasi wawancara, observasi dan FGD pada para pemangku kepentingan kegiatan SEPEDA KEREN. Metode pemantauan lainnya adalah menuliskan cerita perubahan yang dialami oleh kader sebagai pelaksana kegiatan dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar bagi penguatan dan pembelajaran pelaksanaan kegiatan.

Pemda Kabupaten Trenggalek menetapkan indikator keberhasilan (*outcome*) yang dicapai pada tahun kelima yaitu²⁵:

1. Terdapat lima ratus orang fasilitator SEPEDA KEREN.
2. Dua puluh persen fasilitator SEPEDA KEREN aktif dan konsisten melakukan pengorganisasian dan advokasi.
3. Terdapat peningkatan jumlah partisipan sebagai representasi kelompok rentan pada musdes, musrenbangdes, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten sebesar seratus persen atau dua kali lipat dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan SEPEDA KEREN²⁶.
4. Terdapat peningkatan sebesar 20 persen terhadap jumlah program dan/atau kegiatan serta anggaran bagi perempuan/disabilitas/anak/pekerja migran purna, berdasar usulan dari kelompok rentan.
5. Tiga orang perempuan/disabilitas/wali anak/keluarga pekerja migran/pekerja migran purna mengikuti pemilihan dan/atau duduk pada posisi formal berpengaruh di desa, misalnya sebagai perangkat desa, anggota tim penyusun Musrenbang desa, anggota tim penyusun RPJM Desa, dsb.
6. Terdapat dua kebijakan dan/atau regulasi desa yang terkait dengan keberpihakan kepada kelompok rentan di setiap desa.

SEPEDA KEREN bertujuan mendorong perubahan sosial yang terukur, sehingga indikator keberhasilan yang ditetapkan pada tahun kelima diturunkan dalam capaian per tahun, yang secara akumulatif terkait dengan capaian menengah dan akhir. Dampak kegiatan ini adalah pada peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, yang dapat dilihat dari peningkatan angka IPM, IPG dan angka indikator statistik terkait pembangunan lainnya di Kabupaten Trenggalek. Selain angka statistik, juga ditandai dengan terbukanya akses kelompok rentan pada pendidikan inklusif, kemandirian ekonomi kelompok rentan, kepemimpinan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan jabatan formal di desa, dan pelayanan inklusif di desa dan supradesa.

²⁵ Indikator dalam Juknis SEPEDA KEREN ini dihitung dan ditentukan oleh Pemda Trenggalek untuk dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan SEPEDA KEREN. Angka dalam indikator ini mempertimbangkan kondisi riil termasuk tantangan penerimaan dan potensi kapasitas serta konsistensi dari pelaku SEPEDA KEREN (wawancara dengan Kabid P3A, Dinsos P3A Kab. Trenggalek, Desember 2021).

²⁶ Untuk mendapatkan penilaian ini, Pemda perlu memiliki data baseline jumlah partisipan kelompok rentan yang hadir dalam forum perencanaan pembangunan dari data kehadiran peserta forum perencanaan pembangunan sebelum dilaksanakan Musrena Keren dan SEPEDA KEREN. Dalam Juknis maupun data formal lain dari Pemda Trenggalek, tidak ada informasi data baseline ini.

3.2.6 Kader SEPEDA KEREN Aktif dalam Advokasi Perubahan di Desa

Pasca pelatihan bagi Kader SEPEDA KEREN, mentor bersama Forum PUSPA dan OPD terkait melakukan pendampingan intensif pada kader untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan sebagai kader, menyusun langkah pengorganisasian komunitas kelompok rentan di desa dan strategi advokasi, sehingga mereka mampu melakukan pengorganisasian dengan baik, mengelola isu advokasi dan mendorong perubahan sosial di desa.

Pengorganisasian komunitas yang dilakukan oleh kader menghasilkan terbentuknya kelompok keterwakilan berdasarkan kerentanan yang terdiri dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan/atau keluarga penyandang disabilitas, anak dan/atau wali anak, serta keluarga dan/atau pekerja migran purna dan kelompok rentan lainnya. Kader dan kelompok keterwakilan bersama-sama melakukan advokasi²⁷ baik di level desa, kecamatan dan kabupaten dengan dukungan mentor, anggota Forum PUSPA, dan keterlibatan lembaga/organisasi/individu dengan keahlian sesuai yang dibutuhkan. Advokasi di level kecamatan dan kabupaten dapat dilakukan bersama-sama dengan kader dan kelompok keterwakilan dari desa lainnya untuk mendorong perubahan pada isu tertentu secara lebih kuat.

Tujuan advokasi yang dilakukan oleh kader dan kelompok kepentingan adalah:

- Pembangunan desa yang inklusif, yang memberikan jaminan keterlibatan perempuan, anak, penyandang disabilitas, keluarga dan pekerja migran purna, dan kelompok rentan lainnya terkait akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol pembangunan di desa.
- Pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemenuhan hak dan bina keluarga pekerja migran, dan pemenuhan hak kelompok rentan lainnya.
- Diterbitkannya peraturan desa (perdes) terkait jaminan dan perlindungan bagi kelompok rentan untuk dapat mengikuti pemilihan menjadi aparatur desa atau kepala dusun atau kepala desa, dan Perdes Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa Inklusif.

Dengan kapasitas yang memadai tersebut, ke depannya diharapkan kader mampu untuk:

1. Terlibat secara aktif dalam Musrena Keren, musrenbang desa sampai kabupaten serta mengawal usulan Musrena Keren agar masuk ke dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) dan daftar usulan rencana kerja pembangunan (DU-RKP).
2. Berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Informasi ini bermanfaat untuk menyusun strategi memperjuangkan usulan kebutuhan kelompok rentan.
3. Mendorong dan memfasilitasi replikasi kelas SEPEDA KEREN di desanya dan di desa lainnya.
4. Memfasilitasi pelaksanaan Musrena Keren di dusun, desa atau kecamatan.
5. Memfasilitasi advokasi perencanaan dan anggaran pembangunan desa inklusif baik di desanya dan desa perluasan.
6. Melakukan dokumentasi pembelajaran melalui pengembangan media komunitas dengan dukungan mentor dan Forum PUSPA.

²⁷ Advokasi yang dilakukan adalah advokasi kebijakan dan advokasi untuk perubahan sosial bagi pemenuhan hak kelompok rentan.

Bab 4.

ANALISIS PELAKSANAAN SEPEDA KEREN

Bagian ini memaparkan analisis pelaksanaan SEPEDA KEREN selama tahun 2019-2020 dan beberapa perkembangan sampai pertengahan tahun 2021. Informasi yang dipaparkan sesuai dengan pertanyaan pendokumentasian yaitu: 1) Proses pengembangan desain SEPEDA KEREN, termasuk gambaran peran tiap pelaku; 2) Struktur kelembagaan yang disusun dan implementasinya; 3) Pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN; 4) Perubahan dan praktik baik yang terjadi setelah pelatihan pada peserta SEPEDA KEREN; 5) Faktor yang memengaruhi yang dilihat dari regulasi, dukungan institusi dan anggaran, kapasitas pelaku SEPEDA KEREN, dan dampak pandemi COVID-19 pada pelaksanaan kegiatan.

4.1 PROSES PENGEMBANGAN DESAIN SEPEDA KEREN

SEPEDA KEREN bertujuan mendorong partisipasi kelompok rentan, yang tujuan jangka panjang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan strategis mereka dalam tata kelola pembangunan yang inklusif. Proses pengembangan desain SEPEDA KEREN dilakukan secara partisipatif antara Pemda beserta OPD terkait dan Konsorsium OMS yang memiliki pengalaman yang baik bekerja dengan kelompok marjinal.

Branding SEPEDA KEREN adalah pada isu inklusi dalam tata kelola pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek, menjadikan inovasi ini berbeda dengan kabupaten lain. Kegiatan ini didesain untuk menjawab beberapa permasalahan di desa dan supra desa, misalnya advokasi pemanfaatan dana desa, masalah inklusivitas dalam pembangunan mulai dari desa sampai kabupaten, dan partisipasi perempuan dan kelompok rentan, yang dampaknya dapat memengaruhi banyak hal, misalnya kemiskinan dan akses pada pembangunan.

Keberadaan SEPEDA KEREN tidak bisa dilepaskan dari Musrena Keren, karena SEPEDA KEREN merupakan pemberdayaan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, yang menyiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam kegiatan SEPEDA KEREN terdapat proses fasilitasi peningkatan kapasitas kader dan kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam Musrena Keren, di mana transformasi ini implementasinya dilakukan para kader didukung oleh kemauan dari desa.

SEPEDA KEREN didesain dengan prinsip partisipatif dari banyak pihak untuk menentukan: 1) visi misi, 2) komponen pelaksanaan dari sisi: regulasi, kelembagaan, pelaksana kegiatan; 3) perubahan yang dikehendaki dalam jangka waktu tertentu sehingga terukur output dan capaiannya, 4) aktivitas dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan. Proses desain kegiatan dengan prinsip partisipatif ini melibatkan beberapa OPD, tidak hanya Dinsos P3A saja, sehingga harapannya program ini memiliki kepemilikan yang kuat di Trenggalek. Sampai bulan Juli 2021 kepemilikan program terlihat sangat kuat di Dinsos P3A, tetapi di Bappeda dan DPMD sudah ada komitmen untuk mendukung kegiatan ini. Demikian pula komitmen politis Bupati yang cukup kuat yang menyatakan bahwa SEPEDA KEREN merupakan salah satu langkah untuk memajukan kelompok marjinal di Trenggalek. Tabel 4 menggambarkan peran masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan SEPEDA KEREN, yaitu:

TABEL 4. PERAN PELAKU DALAM SEPEDA KEREN 2019-2020

PELAKU	PERAN
Kepala Daerah dan jajaran Pemda Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan regulasi sebagai payung pelaksanaan dan pembiayaan. Menetapkan struktur kelembagaan yang menaungi kegiatan. Membina berfungsinya kelembagaan yang menaungi kegiatan.
Bappeda Kab. Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan penganggaran sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai desain. Memberikan dukungan untuk penganggaran responsif gender dan kelompok rentan pada lintas OPD.
Dinsos P3A Kab. Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai OPD yang bertanggung jawab untuk isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (termasuk kelompok rentan lainnya). Secara struktural membina dan bertanggung jawab atas kelembagaan yang menaungi kegiatan SEPEDA KEREN. Terlibat dalam semua tahapan pelaksanaan, mulai desain, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.
Dinas PMD Kab. Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> Berkontribusi memberikan bimbingan teknis pada pemerintah desa terkait dukungan desa bagi pelaksanaan SEPEDA KEREN, termasuk untuk pendanaan dari APBDesa.
Forum PUSPA Kab. Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai penanggung jawab pelaksanaan SEPEDA KEREN (termasuk koordinasi dengan Dinsos P3A). Melaksanakan kegiatan di semua tahapan. Melakukan pembinaan dan koordinasi rutin dengan mentor. Berkoordinasi secara rutin dengan pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah dalam kerangka pelaksanaan program SEPEDA KEREN. Membuat laporan kegiatan.
Konsorsium OMS	<p>Berkontribusi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengayaan pendekatan dan metode kegiatan. Penguatan kapasitas Pemda dan Forum PUSPA. Penyusunan modul pembelajaran dan modul pemantauan dan evaluasi, Pelatihan mentor. Penguatan kapasitas kader (dalam proses pendalaman materi dan strategi advokasi).
KOMPAK	<p>Berkontribusi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desain SEPEDA KEREN. Penyusunan modul pembelajaran bagi mentor dan modul pemantauan dan evaluasi. Dukungan pelaksanaan pelatihan bagi mentor.

Sumber: Juknis SEPEDA KEREN 2019, data primer 2020.

*OPD yang terlibat secara intensif di awal dan pada saat pendokumentasian ini dilakukan adalah Bappeda, Dinsos P3A dan DPMD.

4.2 STRUKTUR KELEMBAGAAN YANG DISUSUN DAN IMPLEMENTASINYA

Pemda Trenggalek menetapkan struktur SEPEDA KEREN, di mana Forum PUSPA sebagai penanggung jawab pelaksanaannya. Secara politis struktur ini memiliki jaminan untuk berjalan karena terpilihnya kembali Bupati yang menjabat sebelumnya, yang memberikan dukungan kuat bagi pelaksanaan SEPEDA KEREN. Disamping itu, Forum PUSPA sebagai forum bersama dengan model kerja jaringan pemangku kepentingan antara pemerintah, OMS, serta pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi, media dan swasta berpotensi menjamin keberlangsungan pengelolaan dan pelaksana kegiatan SEPEDA KEREN. Dengan adanya OMS lokal, Forum ini memiliki potensi untuk menjangkau desa.

Saat laporan pendokumentasian ini ditulis, struktur SEPEDA KEREN sudah terbentuk namun memang belum berjalan maksimal. Peran yang sangat kuat sebagai motor penggerak SEPEDA KEREN nampak pada Dinsos P3A mulai awal program. Kondisi ini bisa dipahami karena sebagai OPD penanggung jawab isu tersebut. Untuk menjaga keberlanjutan dan semangat gerakan pemberdayaan kelompok rentan, langkah strategis ke depannya adalah memfasilitasi konsolidasi internal yang lebih intensif di dalam Forum PUSPA terkait dengan pelaksanaan SEPEDA KEREN, termasuk memetakan potensi kelembagaan yang dimiliki forum ini. Karena penetapan Forum PUSPA sebagai lembaga pelaksana kegiatan SEPEDA KEREN juga bertujuan merevitalisasi forum ini agar dapat berperan sesuai mandatnya di daerah dengan kerja jejaring. Selama ini Forum PUSPA sudah memiliki beberapa jaringan OMS lokal, seperti LPA Trenggalek, 'Aisyiyah, dan Fatayat. Potensi yang dapat dilakukan dengan jaringan yang ada misalnya, mengintensifkan pertemuan dengan tokoh kunci 'Aisyiyah dan Fatayat yang bergabung dalam Forum PUSPA untuk mendapatkan dukungan organisasi tersebut. Selanjutnya dengan modal jaringan mereka sampai level desa, dapat menjangkau masyarakat desa di wilayah kerja organisasi tersebut untuk terlibat dalam pelaksanaan SEPEDA KEREN.

4.3 PELAKSANAAN KEGIATAN SEPEDA KEREN

4.3.1 Rekrutmen dan pelatihan Mentor SEPEDA KEREN

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek, terdapat 216 pelamar untuk posisi mentor SEPEDA KEREN, yang komposisinya adalah 132 perempuan (61%) dan 84 laki-laki (39%). Pendidikan terakhir pelamar rata-rata adalah sarjana S1 (76%), SMA sederajat (16%), dan diploma (8%).

Dinsos P3A melibatkan psikolog perwakilan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Trenggalek, LPA Trenggalek, dan District Coordinator KOMPAK untuk Kabupaten Trenggalek untuk menyeleksi pelamar sebagai calon mentor. Pihak yang terlibat dalam proses seleksi menentukan bobot penilaian pada beberapa aspek sebagai berikut: perspektif gender (20%), perspektif hak anak (20%), pengetahuan pembangunan daerah, khususnya Trenggalek dan komitmen (30%), pengalaman sebagai fasilitator (10%), dan tes psikologi (20%). Proses seleksi ini meloloskan 25 calon mentor yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan dan memiliki potensi sebagai fasilitator SEPEDA KEREN. Komposisi gender calon mentor yang lolos seleksi adalah 16 perempuan dan 9 laki-laki.

Calon mentor yang lolos seleksi kemudian mengikuti pelatihan mentor SEPEDA KEREN pada kuartal terakhir tahun 2019 selama 5 hari penuh, mulai hari Rabu sampai Senin, di mana pada hari Minggu kegiatan pelatihan ditiadakan. Jumlah hari pelatihan mentor lebih pendek daripada desain kegiatan

yang ditentukan selama 7 hari. Perubahan ini merupakan permintaan mentor yang kemudian disepakati bersama dengan fasilitator pelatihan untuk mengintensifkan waktu pertemuan mulai pagi sampai malam hari, sehingga jumlah hari pelatihan menjadi lebih sedikit. Tugas luar kelas untuk mendapatkan data kelompok rentan di desa diberikan secara berkelompok yang dikerjakan pada hari Minggu. Menurut mentor, tugas ini dilakukan melalui fitur searching google dan studi kasus berdasarkan pengetahuan mentor atau kenalan mentor, sehingga tidak ada praktik lapangan dengan masyarakat atau kunjungan ke desa²⁸. Praktik fasilitasi dan role play Musrena Keren dilakukan di dalam kelas.

Fasilitator pelatihan mentor adalah dari perwakilan Konsorsium OMS dan konsultan KOMPAK. Pelatihan ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinsos P3A dan istri Bupati sebagai Ketua Forum PUSPA sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK dengan tujuan memberikan semangat bagi mentor. Pada materi tertentu, Dinsos P3A dan istri Bupati memberikan informasi terkait kondisi di Trenggalek, misalnya tentang kondisi kelompok rentan di Trenggalek, tujuan program, dan peran mentor.

Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode partisipatif dan diskusi reflektif. Fasilitator menggunakan metode ini untuk membongkar keyakinan mengenai kesetaraan gender, inklusi sosial, hak dan peran semua warga termasuk kelompok rentan dalam pembangunan. Dari proses pelatihan yang dilakukan, fasilitator mendorong peserta untuk mengembangkan rasa empati, berpikir kritis, menerima prinsip keadilan dan kesetaraan gender, keberpihakan pada kelompok rentan dan komitmen untuk bekerja dengan kelompok rentan. Bagi mentor, pelatihan tersebut memberikan banyak pengetahuan baru mengenai prinsip GESI utamanya kesetaraan gender, pemahaman mengenai kelompok rentan, pemahaman metode partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat, dan bekerja dengan kelompok rentan. Namun mereka mengakui jika isi modul pembelajaran cukup berat dan merasa waktu pembelajaran kurang lama. Terdapat kebutuhan pada mentor untuk mendalami semua materi, terutama tentang hak asasi perempuan dan kelompok rentan, bagaimana cara menyampaikan materi ini pada kader melalui pertemuan yang sifatnya refreshment, untuk menguatkan kembali materi dan peran mereka sebagai mentor.

“...terkait dengan modul pembelajaran bagi mentor, menurut saya materi yang disampaikan bagus dan lengkap. Saya mendapatkan pengetahuan baru dan pemahaman baru terkait pemberdayaan masyarakat. Namun bagi saya dan beberapa teman lainnya, materi tersebut berat dan disampaikan dalam waktu yang singkat, sehingga banyak hal yang masih perlu pendalaman dan diskusi.” (Koordinator Mentor SEPEDA KEREN Kecamatan 1)

Kondisi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan OMS dan Konsultan KOMPAK yang memfasilitasi pelatihan tersebut, bahwa terdapat kebutuhan pertemuan intensif bagi mentor untuk menajamkan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial yang benar-benar berpihak kepada kelompok rentan. Dengan demikian mereka memahami tujuan utama SEPEDA KEREN dan dapat meningkatkan teknik fasilitasi untuk menyampaikan isi modul ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami.

Setelah mengikuti pelatihan, mereka dikukuhkan sebagai Mentor SEPEDA KEREN dan dibagi dalam beberapa wilayah penugasan di lokasi uji coba. Distribusi 25 orang mentor untuk 5 kecamatan adalah

²⁸ Menurut mentor, pemetaan awal kondisi kerentanan dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi selama setengah hari.

5 orang mentor bertanggung jawab untuk 1 kecamatan yang meliputi 3 desa lokasi uji coba.²⁹ Dari 5 orang mentor di tiap kecamatan dipilih satu orang sebagai koordinator yang mengoordinasi kegiatan di kecamatan tersebut.

4.3.2 Rekrutmen dan Pelatihan Kader SEPEDA KEREN

Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan bagi Kader SEPEDA KEREN

Komunikasi dengan pemerintah desa lokasi penugasan dimulai saat melakukan sosialisasi SEPEDA KEREN dan melakukan pemetaan sosial kondisi desa. Sosialisasi program sebagian besar dilakukan pada awal tahun 2020, namun di dua kecamatan dilakukan di akhir 2019.³⁰ Pada pertemuan tersebut, mentor menyampaikan pada pemerintah desa bahwa pelatihan kader dilakukan bulan Maret 2020, untuk itu meminta bantuan desa melakukan rekrutmen kader. Jumlah kader adalah 10 orang tiap desa, dengan komposisi terdiri dari keterwakilan kelompok rentan (60%) dan 40% merupakan kader desa atau aktivis yang memiliki kepedulian dan komitmen memperjuangkan isu kelompok rentan, dan representasi aparatur pemerintah desa dan/atau BPD. Pemerintah desa melakukan perekrutan kader dengan pertimbangan jadwal pelatihan pada kuartal pertama 2020.

Sebagai dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi dukungan pendanaan yang berkurang dan arahan pembatasan sosial, pelatihan kader yang direncanakan pada bulan Maret 2020, menjadi mundur pelaksanaannya pada kuartal akhir tahun 2020 dengan pengurangan jumlah pertemuan tatap muka pembelajaran. Desain kegiatan menyebutkan jumlah pertemuan tatap muka adalah 16 tatap muka yang dilakukan selama 6-8 bulan, dengan pertimbangan pemberian materi dan pemahaman terhadap materi secara bertahap, menjadi 5 kali tatap muka dalam waktu 5 hari. Perubahan durasi pembelajaran yang pendek bagi kader tersebut berdampak pada persiapan penyampaian materi kepada kader oleh mentor. Jarak waktu yang cukup jauh antara pelatihan mentor dengan pelaksanaan pelatihan kader, latar belakang kader yang beragam termasuk keragaman usia dan kondisi kerentanan, konteks desa yang beragam, dan waktu pembelajaran pada kader yang pendek menjadi tantangan bagi mentor untuk melakukan penyesuaian.

“Mentor sudah dilatih modul program pada tahun 2019 dan kemudian pelaksanaan terhenti karena pandemi kira-kira satu tahun. Kami melakukan penyesuaian dan improvisasi dalam menyampaikan materi kepada kader, agar mereka bisa menerima materi. Meskipun diakui mereka masih perlu pendampingan dan melakukan praktik di lapangan.” (Koordinator Mentor SEPEDA KEREN Kecamatan 2)

“Memang ada pertemuan persiapan pelatihan kader [bagi mentor sebelum pelatihan kader]. Namun jarak satu tahun dari pelatihan mentor sangat berpengaruh pada kami untuk persiapan semua materi. Terbatasnya jumlah tatap muka dengan kader yang awalnya adalah 16 kali tatap muka menjadi 5 kali tatap muka, kalau sesuai Juknis dilakukan selama 6-8 bulan menjadi dilakukan dalam waktu 5 hari, tiap hari rata-rata 4-5 jam tatap muka. Sehingga masing-masing tim mentor perlu membuat prioritas materi apa saja yang

²⁹ Distribusi penugasan mentor umumnya tidak berdasar domisili mentor, karena sebagian besar mentor berdomisili di Kota Trenggalek. Hanya sebagian kecil mentor yang merupakan warga kecamatan lokasi memilih bertugas di kecamatan tersebut.

³⁰ Terdapat dua mentor yang menyatakan kunjungan ke desa dilakukan pada akhir tahun 2019, namun lainnya menyatakan pada awal 2020. Pertemuan sosialisasi juga mengundang Kecamatan. Setelah itu, sampai Juli 2021 belum ada kegiatan sosialisasi bagi pemerintah desa di lokasi uji coba.

harus disampaikan dan mana yang tidak disampaikan serta menentukan metode dan membahasakannya dengan istilah yang umum agar bisa diterima kader.” (Koordinator Mentor SEPEDA KEREN Kecamatan 5)

Hambatan Rekrutmen Kader SEPEDA KEREN di Lokasi Uji Coba

Perekrutan Kader SEPEDA KEREN mulai dilakukan oleh pemerintah desa pada kuartal awal tahun 2020. Kader yang diharapkan terpilih adalah mereka yang mewakili kelompok rentan dan kader desa yang sudah aktif, dengan komposisi lebih besar bagi perwakilan kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya). Pemerintah desa berusaha memenuhi kriteria yang diberikan oleh program, dengan mencari calon kader potensial yang memiliki kepedulian sosial, komitmen untuk bekerja dengan masyarakat dan memiliki ide inovatif, sehingga dapat menjalankan peran sesuai tuntutan program dan menjangkau sasaran program.

Namun terdapat kondisi yang menyebabkan komposisi keterwakilan kader kurang sesuai dengan desain kegiatan. Perangkat desa dan mentor telah memberikan penjelasan kepada calon kader potensial mengenai kegiatan dan peran kader, tetapi mereka tetap menolak permintaan tersebut. Penyebabnya adalah masih rendahnya keaktifan warga dalam kegiatan desa dan ketidakpercayaan diri untuk tugas tersebut. Beberapa calon kader yang pada awalnya bersedia, saat menjelang pelatihan mengundurkan diri atau tidak hadir dalam pelatihan dengan alasan beragam, misalnya karena prioritas pekerjaan dan rasa tidak percaya diri. Sebagian yang mengundurkan diri pada saat pelatihan adalah kader dari penyandang disabilitas dan juga kader laki-laki. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah desa tetap berusaha merekrut kader berjumlah 10 orang, yang umumnya penggantinya adalah dari PKK atau anggota BPD perempuan.

Profil Kader SEPEDA KEREN di Lokasi Uji Coba

Tabel 6 memaparkan profil Kader SEPEDA KEREN yang dilakukan di 5 kecamatan wilayah uji coba tahun 2020, sebagai berikut:

TABEL 5. PROFIL KADER SEPEDA KEREN 1 DI 5 KECAMATAN UJI COBA

KECAMATAN	JUMLAH KADER	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	LATAR BELAKANG DAN KOMPOSISI KETERWAKILAN ³¹
Kecamatan 1	30	30	-	90% adalah PKK, kader desa, BPD. 10% adalah perwakilan Ormas dan tokoh masyarakat
Kecamatan 2	31	27	4	80% adalah kader PKK, kader desa, BPD; 20% adalah pendamping desa, Puskesmas, dan perwakilan perempuan non-PKK
Kecamatan 3	30	27	3	67% adalah kader PKK, kader desa, BPD, BUMDes, Karang Taruna; 33% perwakilan Ormas dan perempuan non-PKK
Kecamatan 4	20	27	3	75% adalah kader PKK, kader desa, BPD, BUMdes; 25% adalah anggota Pekka, perwakilan Ormas, perwakilan anak dan mantan pekerja migran
Kecamatan 5	30	29	1	40% adalah dari PKK, kader desa, BPD; 30% perwakilan Ormas; 20% anggota Pekka; dan 10% perwakilan disabilitas
Jumlah	151	140	11	

Sumber: data sekunder Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek, 2020.

Sesuai tabel 6, total kader di 15 desa ujicoba adalah 151 orang. Kader SEPEDA KEREN yang terpilih mewakili desa adalah kader untuk lansia, BALD, Posyandu, dan ODGJ. Ormas adalah Fatayat Muslimah, Anshor, IPPNU, dan perwakilan anak yang diundang sebagai peserta pelatihan kader minimal kelas 1 SMP dan maksimal berusia kurang dari 18 tahun. Perwakilan kader dari kelompok rentan tahun.

yang terbanyak adalah dari kelompok perempuan yang diwakili oleh PKK, kader dari kegiatan desa, kelompok perempuan lainnya di desa, dan anggota Ormas di desa.

Komposisi kader berdasarkan jenis kelamin dan kerentanan di tiap desa berbeda-beda. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa terdapat beberapa desa yang seluruh kadernya adalah perempuan, pertimbangan pemerintah desa adalah bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sekolah perempuan sehingga kader yang terlibat adalah perempuan. Jika terdapat kader laki-laki, maka jumlahnya antara 1-4 orang yang mewakili kelompok anak dan penyandang disabilitas.

Perwakilan Kader SEPEDA KEREN dari lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak sulit untuk dipenuhi. Bagi kelompok lansia, mereka merasa pelatihan tersebut berat, sedangkan untuk anak-anak adalah terkendala jam belajar, dan bagi penyandang disabilitas adanya kesulitan untuk mengakses ke tempat pelatihan serta proses pelatihan terkait dengan kondisi disabilitasnya.³² Sehingga untuk tiga kelompok rentan tersebut banyak diwakili pada Kader Posyandu Lansia, Guru PAUD/TK/SD/SMP dan pengamat pendidikan, keluarga penyandang disabilitas, dan kader Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Realitas bahwa komposisi kader dari kelompok rentan kurang terwakili, menjadi tantangan bagi pengelola program untuk menjangkau mereka, misalnya melalui RTL pelatihan kader dan kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kader pasca pelatihan.

Pelatihan Kader SEPEDA KEREN dan Manfaatnya bagi Kader

Dinsos P3A melaksanakan pelatihan Kader SEPEDA KEREN tahap pertama pada akhir bulan November 2020 di 15 desa uji coba selama 5 hari dengan durasi pertemuan 4-5 jam per hari. Tim mentor masing-masing kecamatan mengoordinasi pelatihan untuk kader dari tiga desa wilayah uji coba yang dilakukan di ruang pertemuan di kecamatan atau di salah satu balai desa dari tiga desa tersebut. Mentor mengelompokkan peserta sesuai asal desa dan memfasilitasi pemberian materi. Selama proses pelatihan kader, beberapa pemerintah desa menghadiri pelatihan meskipun tidak setiap hari. Kehadiran mereka bertujuan memberikan semangat bagi kadernya.

Materi pelatihan yang disampaikan pada kader adalah materi dari modul pelatihan bagi mentor dengan materi tambahan dari pihak OPD (Dinsos P3A) seperti pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada masa pandemi ini dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM - untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten dan pembentukan forum anak di desa).

Pelatihan kader dilakukan di dalam kelas dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan satu kali melakukan simulasi penyelenggaraan Musrena Keren desa. Metode ini dipilih karena terbatasnya waktu pelatihan dan banyaknya materi untuk disampaikan. Hambatan efektivitas penyampaian materi pelatihan selain waktu yang terbatas adalah pelaksanaan pelatihan yang berbarengan dengan jadwal persiapan Pemilu 2020. Hampir separuh peserta adalah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang menyebabkan dalam setiap pertemuan pasti terdapat kader yang tidak hadir. Fokus kecamatan dan desa juga lebih banyak pada persiapan Pemilu. Dengan demikian, menurut mentor, pasca pelatihan kader perlu memperoleh pendampingan untuk mendiskusikan materi yang belum dipahami

³² Wawancara dengan perwakilan pemerintah desa menyatakan bahwa mereka lebih memprioritaskan kader yang sehat secara fisik, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengakses lokasi pelatihan dan mengikuti proses pelatihan; wawancara dengan Mentor dan DKT OMS yang menyatakan pelatihan kader dilakukan di kecamatan yang jarak tiap desa dan kondisi infrastruktur jalan beragam, akses ke dalam tempat pertemuan belum ramah bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan penerjemah bahasa isyarat juga belum dipikirkan oleh program ini. Ketika ditanyakan apakah kehadiran kelompok rentan juga terkait kendala karena pandemi, hal tersebut bukan alasan utama, karena pertemuan dilakukan dengan protokol kesehatan.

saat pelatihan, misalnya tentang hak asasi perempuan dan kelompok rentan, tata kelola desa, kemudian mendalami materi mengenai teknik pengorganisasian dan teknik komunikasi untuk melakukan pengorganisasian kelompok rentan dan advokasi, dan menuliskan cerita perubahan yang mereka alami selama terlibat dalam kegiatan SEPEDA KEREN. Dari sisi Kader, mereka mengaku bahwa materi yang diberikan dalam pelatihan sangat banyak, cukup berat, merasa perlu untuk mempelajari ulang, dan mendiskusikan lebih lanjut dengan mentor setelah pelatihan selesai. Beberapa materi yang dirasa berat dan ingin didalami lagi adalah materi mengenai tata kelola di desa, pengarusutamaan gender, dan bagaimana melakukan advokasi.

Meskipun dilakukan dalam waktu singkat dan merasa masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, secara umum Kader SEPEDA KEREN memiliki kesan positif terhadap proses dan materi pelatihan. Kader mengapresiasi metode mentor dalam menyampaikan materi dengan teknik permainan dan diskusi interaktif, di mana metode ini baru diketahui oleh sebagian besar kader. Melalui metode pembelajaran partisipatif, mereka mendapatkan pengetahuan baru, baik pengetahuan mengenai pemahaman dirinya dan peran sosialnya, menyadari mereka memiliki hak dalam pembangunan, dan mulai menghubungkan dengan kondisi masyarakat desanya.

“Materi yang disampaikan bagus, saya masih mengingat bagian mengenai kesetaraan gender dan inklusi, juga tentang hak saya sebagai warga negara, dan ternyata sudah banyak peraturan yang dibuat pemerintah untuk menjamin hak warga negara. Cara mentor menyampaikan juga menyenangkan, menggunakan game dan banyak diskusi, sehingga dapat mencairkan suasana dan bersedia bertukar pendapat.” (Kader SEPEDA KEREN Desa B Kecamatan 2)

Para kader menyatakan bahwa semua materi penting untuk dipelajari, namun materi yang mereka sukai dan memberikan manfaat praktis bagi kehidupan sehari-hari adalah materi tentang hak asasi perempuan dan hak anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan bermain peran dalam simulasi Musrena Keren. Selain mendapatkan pengetahuan, peserta juga mendapatkan jaringan pertemanan dengan kader desa lainnya. Jaringan kader antar desa berpotensi membentuk sebuah jaringan advokasi bersama untuk isu tertentu, misalnya tentang perlindungan anak di Kabupaten Trenggalek.

“Manfaat yang dirasakan dari pelatihan kader SEPEDA KEREN adalah menambah pengalaman, banyak teman dari desa lainnya, pengetahuan mengenai hal baru dan pengasuhan anak yang lebih baik. Nantinya kami bisa bekerja sama dengan kader desa lainnya,” ujar Kader SEPEDA KEREN dari Desa C Kecamatan 3.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pelatihan Kader SEPEDA KEREN 1 di 5 Kecamatan Uji Coba

Pada akhir sesi pelatihan, semua kader peserta pelatihan di 15 desa uji coba diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang mereka lakukan sebagai Kader SEPEDA KEREN setelah pelatihan. Mentor mendampingi proses penyusunan RTL tersebut dan meminta peserta memilih fokus RTL pada tema isu kelompok rentan, misalnya tema untuk kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Dinsos P3A mewajibkan satu RTL yang harus dilakukan oleh Kader di 15 desa uji coba yaitu pemutakhiran DTKS. Pemutakhiran data ini bermanfaat bagi desa dan kelompok rentan dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan jaminan sosial dari pemerintah pada masa pandemi ini. Tabel berikut adalah sebagian RTL dari 6 desa lokasi program:

TABEL 6. CONTOH RTL KADER SEPEDA KEREN 1 DI 6 DESA LOKASI PROGRAM

NO	NAMA DESA	RTL YANG DIUSULKAN
1	Desa A kecamatan 1	Pemutakhiran DTKS, bantuan alat bagi penyandang disabilitas (kursi roda, alat bantu dengar), pelatihan keterampilan bagi perempuan, membentuk forum anak, pertemuan rutin bulanan kader
2	Desa B kecamatan 2	Pemutakhiran DTKS, pelatihan wirausaha bagi perempuan
3	Desa C kecamatan 3	Pemutakhiran DTKS
4	Desa D kecamatan 4	Pemutakhiran DTKS, Anduk Jebol (Pelayanan Adminduk Jemput Bola) bagi ODGJ, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pelatihan usaha berbasis potensi desa.
5	Desa E kecamatan 5	Pemutakhiran DTKS, pelatihan wirausaha berkelanjutan, perbaikan tata kelola informasi dan komunikasi pemdes pada masyarakat, pelibatan kader perempuan dalam kegiatan desa.
6	Desa F kecamatan 5	Pemutakhiran DTKS, bantuan beasiswa bagi anak sekolah, membentuk forum anak dan kegiatan bagi anak di desa.

Sumber: Data primer, 2020.

Keragaman kapasitas dan latar belakang kader sangat mempengaruhi RTL yang disusun oleh kader di 15 desa uji coba. Sebagian besar kader masih mengusulkan pemenuhan kebutuhan praktis kelompok rentan misalnya bantuan bagi penyandang disabilitas, pelatihan keterampilan wirausaha bagi perempuan yang hanya fokus pada produksi seperti menjahit, membuat kerajinan. Kondisi ini dapat dipahami karena kapasitas dan pengetahuan yang masih terbatas pada lingkup kebutuhan praktis. Namun sudah ada sebagian kader yang mulai menyusun usulan yang lebih strategis. Kader yang mulai mampu menghubungkan materi pelatihan dan RTL dengan kebutuhan strategis ini umumnya telah aktif dalam organisasi di desa dan di luar desa, misalnya sebagai anggota BPD Perempuan, anggota Ormas, anggota kelompok perempuan dampingan PEKKA - yang merupakan salah satu OMS Mitra Strategis KOMPAK di Trenggalek.³³

Setelah selesai menyusun RTL, kader mengomunikasikannya kepada pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan. Pada hari terakhir pelatihan Kader SEPEDA KEREN, sebetulnya pemerintah desa diundang hadir untuk mendengarkan paparan RTL kader desanya dan memberikan dukungan. Namun tidak semua pemerintah desa hadir atau mengirimkan wakilnya. Pada saat triangulasi data yang dilakukan di bulan Januari 2021 dengan sebagian mentor dan kader, ternyata sebagian kader di sebagian desa belum mengkomunikasikan RTL mereka. Penyebab kondisi ini adalah Pemdes masih belum sepenuhnya memahami tujuan dan dukungan yang diharapkan dari desa untuk pelaksanaan SEPEDA KEREN, sehingga kepedulian dan komitmen pemerintah desa atas kegiatan ini belum sepenuhnya terbentuk. Untuk menyampaikan RTL pada desa sebetulnya mentor dapat menjembatani, namun mereka memerlukan surat tugas dari Dinsos P3A. Dengan adanya surat tersebut, mentor dapat menyampaikan ulang gambaran kegiatan, tujuan dan dukungan yang diharapkan dari pemerintah desa. Dengan demikian pemerintah desa menerima informasi kegiatan dengan lebih jelas, termasuk untuk memberikan dukungan pada RTL yang dibuat oleh kadernya. Advokasi pada pemerintah desa juga dapat dilakukan pada saat mentor melakukan pendampingan pada kader pasca pelatihan kader.

4.4 PELAKSANAAN SEPEDA KEREN DI LUAR WILAYAH UJI COBA

³³ Elaborasi usulan terdapat pada bagian perubahan dan praktik baik.

Dinsos P3A juga melakukan sosialisasi di luar wilayah uji coba dengan mengundang kecamatan, pemerintah desa dan pendamping desa di tahun 2020. Menurut Kabid P3A, meskipun tidak semua memberikan dukungan, upaya Dinsos P3A berhasil mendorong 2 kecamatan lain di luar wilayah uji coba untuk melakukan pelatihan Kader SEPEDA KEREN bagi seluruh desa/kelurahan wilayahnya dengan pembiayaan dari desa tersebut untuk biaya transport kader yang hadir di pelatihan.

TABEL 7. PROFIL KADER SEPEDA KEREN DI DUA KECAMATAN NON-UJI COBA

KECAMATAN	JUMLAH KADER	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	LATAR BELAKANG DAN KETERWAKILAN ³⁴
Kecamatan 6 (7 desa)	39	39	-	80% adalah PKK, kader desa, BPD. 20% adalah perwakilan anak (usia SMA), guru PAUD, keluarga penyandang disabilitas.
Kecamatan 7 (11 desa)	56	55	1	67% adalah kader PKK, kader desa, BPD; 33% adalah mantan pekerja migran, perwakilan anak (usia SMA), guru PAUD
Jumlah	95	94	1	

Sumber: data sekunder Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek, 2020

Dalam pelatihan kader di 18 desa wilayah non-uji coba, umumnya perwakilan setiap desa adalah 5 orang, sehingga total adalah 95 kader yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jarak kedekatan geografis desa. Pelatihan di desa non-uji coba dilakukan selama satu hari yang difasilitasi Mentor SEPEDA KEREN, Kabid P3A Dinsos P3A, dan LPA Kabupaten Trenggalek. Meskipun kurang ideal sebagai sebuah pelatihan sesuai desain kegiatan, pertemuan satu hari ini telah mengenalkan SEPEDA KEREN dan tujuannya, yang kedepannya dapat ditindaklanjuti dengan pendalaman diskusi materi dan peran kader. RTL yang dilakukan oleh kader di 18 desa non-uji coba adalah pemutakhiran DTKS di desa/kelurahan masing-masing. Kader di desa non-uji coba terkesan dengan pelatihan satu hari tersebut, menurutnya:

"...pertemuannya singkat, namun bagi saya berkesan karena menjadi tahu program SEPEDA KEREN dan tujuannya. Salah satu manfaat yang saya rasakan adalah pemerintah desa perlu merespons segera kebutuhan warga, terutama kelompok rentan misalnya layanan adminduk. Sebagai Kader SEPEDA KEREN yang kebetulan juga anggota BPD saya telah menyampaikan pada pemerintah desa mengenai program dan tujuan program. Terdapat satu perubahan yaitu pemerintah desa lebih cepat merespons warga yang memerlukan layanan. Biasanya layanan adminduk tidak segera ditanggapi, sekarang lebih cepat dan ini memberikan manfaat bagi warga. Kemudian pemerintah desa juga memberikan anggaran bagi kegiatan kader SEPEDA KEREN sebesar Rp5 juta untuk tahun 2021, anggaran ini digunakan untuk kebutuhan pertemuan-pertemuan rutin Kader SEPEDA KEREN di desa" (Kader desa H Kecamatan 6).

Sedangkan pada tahun 2021³⁵, Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek telah melakukan pelatihan Kader SEPEDA KEREN tahap 2 di 4 kecamatan pada bulan Juni 2021 dan Juli 2021 seperti yang dipaparkan

³⁴ Kader desa disini adalah kader untuk lansia, PAUD, Posyandu, dan ODGJ. Ormas disini adalah Fatayat, Muslimat, Anshor, IPPNU. Perwakilan anak yang diundang sebagai peserta pelatihan kader minimal kelas 1 SMP dan maks berusia kurang dari 18 tahun.

³⁵ Data sekunder yang tersedia masih berupa angka, belum terpilah gender dan latar belakang, dan belum ada keterangan detail mengenai durasi dan proses pelatihan, serta RTL pelatihan.

dalam tabel 8 berikut:

TABEL 8. PELATIHAN KADER SEPEDA KEREN 2 TAHUN 2021

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KADER*
Kecamatan 8	12	60
Kecamatan 9	15	90
Kecamatan 10	7	86
Kecamatan 11	14	
Jumlah	48 desa	236 kader

Sumber: data sekunder Dinsos P3A Kab. Trenggalek, 2021

*belum tersedia data pilah gender pada kader dan latar belakang kader.

4.5. PERUBAHAN YANG DIAMATI DAN PRAKTIK BAIK

Sub bagian ini mengidentifikasi ungkapan reflektif dan RTL pelatihan Kader SEPEDA KEREN tahun 2020 terhadap program sebagai masukan pelaksanaan ke depannya, termasuk respons atas RTL Kader SEPEDA KEREN yang diberikan oleh pemerintah desa dan kabupaten. Analisis pada bagian ini menggunakan Kerangka Perubahan Bennet yang membagi perubahan menjadi 5 level – yang telah dipaparkan pada Bab 2.

Manfaat Langsung dan Perubahan Praktis

Sebagian besar peserta pelatihan mengakui bahwa pelatihan pemberdayaan dengan metode pembelajaran yang partisipatif baru mereka ketahui saat mengikuti pelatihan Kader SEPEDA KEREN. Demikian juga materi yang mengenalkan perspektif dan pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender dan inklusi sosial, dorongan berperan aktif dalam pelatihan serta tuntutan mengimplementasikan hasil pelatihan untuk perubahan di desa.

Pertemuan pembelajaran tatap muka selama lima hari meninggalkan kesan yang positif bagi kader, misalnya meningkatnya rasa percaya diri dan keberanian untuk berbicara menyampaikan pendapatnya, pengalaman baru dalam kehidupan mereka, akses jaringan seperti mendapatkan teman baru, mengenal perangkat desanya, dan mengenal kader dari desa lainnya.

Manfaat langsung dan perubahan praktis ini menunjukkan sense of agency atau rasa keagenan seperti aktif, antusias, berani, senang. Keagenan bermakna bahwa individu tersebut aktif untuk membuat rencana dan melakukan tindakan perubahan. Perubahan praktis dalam bentuk *sense of agency* pada Kader SEPEDA KEREN merupakan titik penting yang dapat menjadi pijakan sebelum mereka mengalami perubahan-perubahan lainnya sebagai agen perubahan.³⁶

“Manfaat yang dirasakan dari pelatihan Kader SEPEDA KEREN adalah menambah pengalaman, banyak teman dari desa lainnya, pengetahuan mengenai hal baru dan

³⁶ Agen perubahan diartikan individu yang bergerak sebagai katalis/pemicu terjadinya perubahan sosial, budaya dan perilaku di lingkungannya.

pengasuhan anak yang lebih baik. Nantinya kami bisa bekerjasama dengan kader desa lainnya.” (Kader SEPEDA KEREN dari Desa C Kecamatan 3)

“Mendapatkan pengalaman baru, cara-cara penyampaian materi oleh mentor menyenangkan dan luwes, menjadi berani menyampaikan pendapat, nantinya bisa digunakan kami bekerja sebagai kader di desa.” (Kader SEPEDA KEREN dari Desa D Kecamatan 4)

“Dalam pelatihan ini kami dilatih berkomunikasi, termasuk komunikasi dalam keluarga. Pengetahuan ini bermanfaat bagi saya untuk berkomunikasi yang lebih sehat dengan suami dan anak, dan berbagi pekerjaan rumah tangga.” (Kader SEPEDA KEREN Desa A Kecamatan 1)

Perubahan Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Sikap, Motivasi, dan Aspirasi

Bagi sebagian peserta pelatihan yang telah aktif berorganisasi, misalnya sebagai anggota dalam organisasi perempuan di desa, anggota Ormas, anggota Serikat Pekka, dan sebagai perangkat desa (termasuk menjadi Ketua RT dan anggota BPD), mereka terlihat lebih memiliki kesadaran atas keberpihakan pada kelompok rentan dan mencoba menerapkan ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan di dalam RTL yang disusun.³⁷

1. Munculnya kesadaran bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa harus mencerminkan prinsip partisipatif dan inklusif.

Kader SEPEDA KEREN dari Desa A merefleksikan metode permainan mengenai persaingan berebut barang ke dalam proses forum perencanaan agar usulan masuk dalam alokasi pendanaan oleh desa.

“Pada saat sesi advokasi anggaran, mentor menyampaikan dengan permainan rebutan barang, yang mencerminkan bagaimana melakukan advokasi anggaran untuk perempuan dan kelompok rentan. Permainan itu mengingatkan tentang Musrena Keren yang pernah saya ikuti, kami memberikan usulan namun tidak diakomodir oleh desa. Kenapa tidak diakomodir, karena perwakilan kelompok rentan yang hadir minim dan prioritas desa lebih pada pembangunan fisik,” ujar Kader SEPEDA KEREN dari Desa A Kecamatan 1.

Dari proses role play Musrena Keren tersebut, kader belajar menerima bahwa tidak semua usulan dalam forum perencanaan dan penganggaran itu pasti diterima dan diakomodir dalam dokumen perencanaan penganggaran. Kader berefleksi cara menyampaikan usulan dan mengawal usulan mereka, misalnya melakukan advokasi kepada Kepala Desa agar usulan kelompok rentan diperhatikan dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pemikiran reflektif untuk mengawal usulan kemudian menjadi salah satu RTL yang diusulkan oleh mereka, selain mengusulkan pertemuan rutin dengan sesama Kader SEPEDA KEREN di desanya dan pertemuan dengan Pemdes untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kader SEPEDA KEREN kedepannya.

Kader SEPEDA KEREN dari Desa D Kecamatan 4 melakukan refleksi atas simulasi Musrena

³⁷ Menurut Mentor, kader yang didampingi mitra strategis KOMPAK terlihat lebih aktif dan memahami materi, misalnya kader dari desa 5. Hal ini berbeda dengan desa yang tidak didampingi KOMPAK dan kader yang baru aktif di SEPEDA KEREN.

Keren pada sesi pelatihan dan membandingkan dengan Musrena Keren yang pernah dia hadiri. Menurutnya Musrena Keren di desanya masih jauh dari sempurna karena tidak terjadi diskusi mengenai usulan dari kelompok rentan dan representasi peserta kelompok rentan jumlahnya sedikit. Pembelajaran di pelatihan kader memberinya pemahaman proses yang ideal Musrena Keren.

Kader SEPEDA KEREN dari Desa E Kecamatan 5 menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dan keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan dan penganggaran, serta kegiatan lain di desa. Kader ini telah mampu merefleksikan pengetahuan dan kesadarannya menjadi sebuah sikap untuk keterbukaan informasi pembangunan di desanya.

“Sebagai RTL saya menyampaikan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di desa, bahwa semua informasi pembangunan di desa harus disampaikan pada masyarakat, agar masyarakat tahu dan bisa berpartisipasi. Ide-ide desa dan pemerintah desa, program yang mau dilakukan, sehingga masyarakat tidak pasif dan kaget ketika hal tersebut dilaksanakan dan berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pelibatan kader perempuan dalam kegiatan desa, tidak hanya di PKK saja, tetapi juga di forum lainnya yang juga (dihadiri) wakil dari anak dan kelompok rentan lainnya.” (Kader SEPEDA KEREN Desa E Kecamatan 5)

Usulan tentang keterbukaan informasi pembangunan direspons oleh pemerintah desa dengan membuat Whatsapp Group (WAG) beranggotakan semua Ketua RT di desa untuk menginformasikan rencana pembangunan di desa. Ketua RT membuat WAG RT dengan warga untuk meneruskan informasi rencana pembangunan di desa padaarganya.

2. Munculnya Keberpihakan untuk Merespons Kebutuhan Kelompok Rentan

Selanjutnya adalah usulan untuk pemenuhan kebutuhan adminduk penyandang disabilitas dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui revitalisasi Forum Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIKR).

“Untuk RTL desa kami, kami mengusulkan program “Anduk Jebol” atau Pelayanan Adminduk Jemput Bola. Layanan ini khusus bagi ODGJ dan penyandang disabilitas lainnya yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukannya sendiri. Kemudian ada juga usulan untuk anak, yaitu pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dengan memanfaatkan forum yang sudah di desa, Forum Pusat Informasi Kesehatan Remaja, sehingga remaja memahami dirinya, kesehatan reproduksi dan seksualnya, menjaga diri tidak terjadi pernikahan anak karena hamil saat pacarana.” (Kader Desa D Kecamatan 4)

Usulan isu adminduk dengan nama “Anduk Jebol” telah mendapat dukungan pemerintah desa. Pemerintah desa mengapresiasinya, karena membantu warga yang membutuhkan dan pada akhirnya juga memberikan kontribusi pada desa. Di level kabupaten, ide-ide tentang layanan bagi disabilitas di desa telah mendapatkan dukungan dari Dinsos P3A dengan adanya desa ramah disabilitas, yang memiliki ancangan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar adminduk, tetapi juga menguatkan desa melakukan perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Munculnya Kesadaran terkait Sumber Penghidupan Berkelanjutan bagi Kelompok Rentan

Sumber penghidupan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mengombinasikan antara kemampuan, keadilan, dan keberlanjutan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan.³⁸ Kader SEPEDA KEREN dari Desa D dan E mengusulkan RTL mengembangkan sumber kehidupan bagi perempuan miskin. Usulan kedua kader tersebut adalah menggali potensi ekonomi di desa, memberikan pelatihan bagi kelompok perempuan miskin dalam hal pengolahan, pengemasan, pemasaran dan mengkaitkan dengan peran BUMDes untuk peningkatan kesejahteraan warga desa. Kader SEPEDA KEREN Desa E telah mengkomunikasikan usulan ini pada pemerintah desa. Respons Pemerintah Desa E cukup positif dan berjanji mengakomodasi usulan tersebut.

Terkait dengan usulan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan kelompok rentan, Pemda Trenggalek menghubungkan ide kewirausahaan kelompok rentan dengan dukungan program lain yang masuk pada daerah, yaitu Program JAPRI yang didanai oleh USAID pada tahun 2021. Program ini menyasar kewirausahaan bagi perempuan dan disabilitas dengan target 200 penyandang disabilitas dan 2000 perempuan. Bagi Pemda Trenggalek, program ini merupakan potensi sebagai basis untuk mengembangkan UMKM Perempuan dan Disabilitas di Trenggalek.³⁹ Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan melibatkan 20 mentor dan 4 kader SEPEDA KEREN sebagai trainer. Dikaitkan dengan SEPEDA KEREN, kesempatan ini dapat bermakna untuk memperdalam keterampilan mentor dan kader dalam memfasilitasi dan mendampingi kelompok rentan.

Berdasarkan paparan dan elaborasi mengenai kesan reflektif dan RTL yang disusun oleh kader peserta pelatihan, dengan menggunakan kerangka perubahan Bennet, secara umum perubahan yang terjadi pada Kader SEPEDA KEREN hingga pertengahan 2021 adalah pada level manfaat langsung dan perubahan praktis. Sebagian kecil perubahan pada kader sudah mencapai level perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan dan aspirasi atau perubahan jangka pendek. Perubahan praktis yang terjadi dalam diri kader menyiratkan bahwa kesadaran kritis sudah mulai muncul pada tahap awal. Sedangkan perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan dan aspirasi menunjukkan bahwa sebagian kader telah memahami aspek penting dalam kehidupan dirinya dan masyarakat. Pada level perubahan jangka pendek ini, mereka juga memiliki keinginan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas, termasuk keinginan mengakses dan mengontrol sumber daya perubahan bagi masyarakat dan kelompok rentan di desa.

Paparan pada sub bagian ini menunjukkan bahwa Program SEPEDA KEREN mulai membukakan kesadaran mengenai permasalahan kelompok rentan dan permasalahan pembangunan di desanya. Program SEPEDA KEREN menjadi wadah bagi kader untuk belajar dan mempraktikkan sesi pembelajaran yang didapatkan di kelas. Pengelola program dari pihak Pemda Trenggalek, terutama Dinsos P3A dalam beberapa hal telah merespons usulan kader desa dan memberikan dukungan misalnya dukungan untuk desa ramah disabilitas dan pelatihan kewirausahaan untuk kelompok rentan. Jika mencermati tujuan SEPEDA KEREN yang melakukan perubahan tata kelola inklusif melalui peran kader di desa, hal penting lain yang perlu didukung oleh pemerintah daerah dan desa adalah: 1) dorongan untuk memunculkan

³⁸ Tri Hariyono. (2020). Partisipasi Perempuan Desa Karang Sari Dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Volume IX Nomor 2 Oktober 2020.

³⁹ <https://www.trenggalekkab.go.id/article/berita/tahun-2020-pemkab-trenggalek-bersama-usaid-japri-berdayakan-2000-wirusaha-baru-dari-perempuan-kelompok-rentan>; <https://www.facebook.com/Dinsosppatreggalek/>; <https://coachfianda.com/2020/03/07/training-of-trainers-jadi-pengusaha-mandiri-japri-trenggalek-2020/>

kesadaran kritis kolektif, dengan memfasilitasi kader untuk berkumpul dengan tujuan menguatkan dan meningkatkan kapasitasnya, merespons isu kelompok rentan sehingga dapat menjadi kekuatan bersama untuk advokasi; 2) pengembangan jaringan kader antar desa dalam satu kecamatan dan kader satu kabupaten untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dan membangun kekuatan kolektif untuk perubahan sosial yang lebih besar di daerah sesuai tujuan program.

4.6 FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI SEPEDA KEREN

4.6.1 Regulasi dan dukungan lintas sektor

Berdasarkan wawancara dengan OPD terkait yaitu Dinsos P3A dan Dinas PMD, dan Konsorsium OMS terdapat beberapa dukungan regulasi dan lintas sektor yang diberikan untuk program SEPEDA KEREN, yaitu:

Tahun 2019 dan 2020:

- a. Dukungan penganggaran pelaksanaan program oleh Bappeda dari APBD, dari sisi jumlah dukungan anggaran menurun karena fokus pada penanganan pandemi COVID-19, tetapi masih dianggarkan untuk pelaksanaan dengan konsekuensi perubahan pada intensitas kegiatan.
- b. Dukungan dari Pemda melalui Sekda dengan mengeluarkan Surat Edaran agar semua desa dan kecamatan menyelenggarakan Musrena Keren.⁴⁰ Bagi desa yang sudah menyelenggarakan SEPEDA KEREN wajib melibatkan Kader SEPEDA KEREN dalam Musrena Keren di desa dan kecamatan. Dalam surat edaran tersebut juga dilampirkan daftar nama, alamat dan nomor kontak mentor untuk menjadi fasilitator Musrena Keren mulai tingkat desa. Kehadiran kader dalam Musrena Keren menjadi penting untuk melihat dampak upaya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan pendampingan pada forum perencanaan dan penganggaran di level desa dan kecamatan. Bagi pemerintah daerah, upaya ini juga bermanfaat untuk mengawal kualitas penyelenggaraan Musrena Keren di desa dan kecamatan.
- c. Dinas PMD bersama-sama dengan Dinsos P3A melakukan sosialisasi Program SEPEDA KEREN di desa⁴¹ dan memberikan penguatan bagi pemerintah desa serta BPD. Kepala Dinas PMD menyatakan bahwa DPMD mendukung program ini.

“DPMD akan terlibat dalam sosialisasi terkait SEPEDA KEREN, karena masih banyak yang belum memahami tujuan program ini. Kami akan menjelaskan bahwa program ini membantu pemerintah desa mencapai desa yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya, dan bagaimana mekanisme penganggarnya dari dana desa. Dinas PMD pada 2021 juga akan memberikan penguatan pada BPD tentang pelatihan PPRG bagi

⁴⁰ Wawancara dengan Kabid P3A Dinsos P3A yang menyatakan berdiskusi dengan Bappeda dan Sekda untuk mengeluarkan surat edaran agar semua desa dan kecamatan menyelenggarakan Musrena Keren dan melibatkan mentor sebagai fasilitator dan menghadirkan kader SEPEDA KEREN.

⁴¹ Dalam kerangka tata kelola desa termasuk penganggaran dari APBDesa untuk kegiatan SEPEDA KEREN.

anggota BPD perempuan di seluruh desa di Kabupaten Trenggalek⁴² dan melibatkan 10% BPD laki-laki secara bertahap dengan pendanaan dari Dinas PMD. Harapannya BPD memahami PUG dan inklusi sosial dalam penerapan PPRG Desa. Upaya ini akan membantu pencapaian tujuan program SEPEDA KEREN". (Kepala DPMD Kabupaten Trenggalek)

Untuk mempercepat capaian program SEPEDA KEREN yang berdampak pada kualitas Musrena Keren, Dinas PMD juga berencana melakukan pendataan desa untuk mendapatkan informasi desa yang sudah melakukan Musrena Keren dan SEPEDA KEREN dan desa yang belum melaksanakan. Informasi ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE Bupati untuk menyelenggarakan SEPEDA KEREN dan Musrena Keren.

- d. Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang rencananya disahkan pada 2021. Dalam beberapa pasal di dokumen Raperda PUG disebutkan bahwa:
- Pemda Kabupaten Trenggalek menyusun rencana aksi daerah untuk PUG melalui kegiatan siklus perencanaan pembangunan dan penguatan partisipasi masyarakat (pasal 8).
 - Penyusunan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya (pasal 10 ayat 3).
 - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa meningkatkan kapasitas perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan melalui advokasi, edukasi, komunikasi dan informasi (pasal 13 ayat 4).

Tahun 2021:

- e. RPJMD Tahun 2021-2026⁴³, memberikan dukungan bagi pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek. Dalam dokumen tersebut dinyatakan visi daerah adalah "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)", dan dalam misi kelima disebutkan "Mewujudkan Trenggalek yang berkepribadian dan mengarusutamakan gender dengan menjunjung tinggi nilai budaya serta toleransi antar umat beragama dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa".
- f. Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor: 360/1582/406.018/2021 tentang Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Beberapa poin dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa penyusunan dokumen tersebut harus mengacu pada pencapaian SDGs Desa, pentingnya memasukkan usulan dari Musrena Keren, dan minimal 30% jumlah tim penyusun adalah perempuan.
- g. Dukungan Pemda Kabupaten Trenggalek dengan menyediakan Sekretariat Rumah Perempuan yang menjadi wadah pemberdayaan, kemudian program penguatan ekonomi dari OPD lain dan program kewirausahaan untuk kelompok rentan.

Dari paparan mengenai dukungan yang diberikan oleh Pemda Trenggalek, menunjukkan upaya untuk menyukseskan SEPEDA KEREN, di mana prinsip pembangunan inklusif masuk dalam RPJMD, surat edaran dan adanya dukungan lintas sektor. Memang payung hukum yang lebih kuat seperti Raperda

⁴² Kepala Dinas PMD menyatakan bahwa jumlah total anggota BPD di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 yaitu 1.288, sedangkan jumlah BPD perempuan adalah 329 orang atau 15% dari jumlah total anggota BPD.

⁴³ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026

PUG, sampai laporan ini ditulis masih menunggu untuk disahkan. Perda PUG berpotensi mendorong keterlibatan lintas sektor, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SEPEDA KEREN, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan dan capaiannya. Sambil menunggu Raperda ini disahkan, kebijakan yang telah ada dimaksimalkan pelaksanaannya, sehingga menjadi bukti yang memiliki daya ungkit untuk mendorong regulasi yang lebih kuat tersebut segera disahkan.

4.6.2 Dukungan anggaran

Adopsi program SEPEDA KEREN oleh pemerintah daerah dapat dimaknai bahwa terdapat jaminan keberlanjutan pembiayaan bagi program, sehingga dapat dilakukan dalam waktu yang lebih panjang dan menjangkau sasaran yang lebih luas. Dengan demikian, akan memfasilitasi kegiatan SEPEDA KEREN meluaskan jangkauan kegiatannya, menambah jumlah kader dan kelompok rentan yang mendapatkan penguatan kapasitas sebagai agen perubahan di desa.

TABEL 9. PEMBIAYAAN APBD UNTUK KEGIATAN SEPEDA KEREN 2019-2021

TAHUN	BESAR PAGU PEMBIAYAAN	NOMENKLATUR PROGRAM/ KEGIATAN DALAM DOKUMEN ANGGARAN	PERUNTUKAN PEMBIAYAAN
2019	Rp523.000.000	Program: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kegiatan: Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Perempuan di daerah	Persiapan: <ul style="list-style-type: none"> • biaya kunjungan belajar ke sekolah komunitas • biaya meeting (konsumsi, transport, ATK, honor narasumber dan panitia), • biaya meeting untuk penguatan Forum PUSPA,
2020	Rp450.000.000 (berkurang menjadi Rp200.000.000 karena penyesuaian untuk penanganan pandemi COVID-19)	Program: Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Biaya pelaksanaan pelatihan kader SEPEDA KEREN 1: <ul style="list-style-type: none"> • Honor mentor dan narasumber • cetak modul, cetak spanduk, ATK • konsumsi pelatihan • sewa alat untuk pertemuan (kursi)
2021	Rp191.161.900	Program: Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Biaya pelaksanaan pelatihan kader SEPEDA KEREN 2: Honor mentor dan narasumber <ul style="list-style-type: none"> • ATK, cetak spanduk, • konsumsi • transport bagi mentor dan narasumber

Sumber: data sekunder Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek 2020, 2021

Tabel 5 menunjukkan dukungan APBD Kabupaten Trenggalek untuk pelaksanaan program SEPEDA KEREN pada 2019, 2020 dan 2021 dan peruntukan pembiayaannya. Pada tahun 2019 yang merupakan fase persiapan, KOMPAK memberikan dukungan untuk penyusunan modul pelatihan mentor dan pelaksanaan pelatihan mentor. Pelaksanaan pelatihan pada Kader SEPEDA KEREN di 15 desa wilayah ujicoba di tahun 2020 dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kabupaten. Pada tahun 2020 terdapat 2 kecamatan yang melaksanakan kegiatan SEPEDA KEREN dengan pembiayaan dari APBDes.

Sebagai upaya keberlanjutan mulai tahun 2021 Pemda Kabupaten Trenggalek mendorong keterlibatan pemerintah desa untuk berbagi pembiayaan penyelenggaraan pelatihan Kader SEPEDA KEREN, di mana desa melalui APBDes membiayai pengeluaran konsumsi dan transport warga mereka sebagai kader yang dilatih, desa yang menjadi lokasi pelatihan menyediakan ruang dan fasilitas pelatihan (kursi, *sound system*, atau tikar), sedangkan APBD Kabupaten membiayai mentor dan narasumber yang melatih kader.

Data Dinsos P3A menyebutkan bahwa dukungan APB Desa untuk SEPEDA KEREN di tahun 2020 sebesar Rp72 juta. Anggaran ini dikeluarkan oleh 18 desa di dua kecamatan non-uji coba yang menyelenggarakan pelatihan kadernya dengan biaya sendiri, yang peruntukannya adalah transport bagi kader peserta pelatihan dan konsumsi pelatihan. Sedangkan di tahun 2021 tercatat dukungan APB Desa sebesar Rp196 juta untuk pelaksanaan pelatihan dan dukungan desa bagi tindak lanjut kegiatan SEPEDA KEREN, misalnya: beasiswa untuk anak penyandang disabilitas, pembentukan forum anak, pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan⁴⁴. Sayangnya, dalam dokumen sekunder, jumlah dukungan APBDes untuk SEPEDA KEREN ini tidak dipilah berdasarkan peruntukan dan lokasi desa.

Masih adanya dukungan pendanaan kegiatan SEPEDA KEREN tidak lepas dari upaya advokasi Dinsos P3A pada bagian keuangan daerah. Dinsos melakukan advokasi untuk mendapatkan jaminan keberlanjutan pembiayaan yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN untuk mencapai hasil sesuai desain kegiatan. Upaya advokasi ini juga dimudahkan dengan posisi Kabid P3A sebagai anggota tim verifikasi anggaran responsif gender pada bagian keuangan daerah. Posisi ini sangat strategis untuk mendorong penganggaran responsif gender lintas sektor, yang mendukung pembangunan yang inklusif di daerah ke depannya.

4.6.3 Dukungan Pemerintah Desa terhadap SEPEDA KEREN

SEPEDA KEREN secara umum memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan perangkatnya tentang kelompok rentan. Dari kegiatan SEPEDA KEREN pemerintah desa mengetahui bahwa proses perencanaan dan penganggaran pembangunan perlu melibatkan kelompok rentan. Pemerintah desa mengetahui bahwa SEPEDA KEREN adalah upaya memberdayakan kelompok rentan untuk terlibat dalam pembangunan daerah sebagai pemenuhan hak mereka untuk berpartisipasi, mengontrol dan menikmati pembangunan.

Namun pemahaman pemerintah desa mengenai SEPEDA KEREN belum sepenuhnya merata di lokasi uji coba dan hal ini mempengaruhi dukungan yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan. Terdapat variasi pemahaman yang memengaruhi dukungan pada pelaksanaan program ke depannya, yaitu:

1. **SEPEDA KEREN dimaknai sebagai program pemerintah kabupaten dan kurang memahami manfaatnya bagi desa**, sehingga dukungan dari mereka menjadi kurang. Seperti diungkapkan oleh Sekretaris Desa G, Kecamatan 2, *“Saya mengetahui adanya program SEPEDA KEREN dari Pemda, kami mengapresiasi program tersebut yang telah melatih kader kami untuk pembekalan pelaksanaan program. Tetapi saya sendiri belum memahami sepenuhnya, ini nanti mau dikemanakan, pembinaannya bagaimana. Jika bisa kedepannya ada sosialisasi dan rencana selanjutnya untuk kader, yang didukung juga oleh anggaran kabupaten tidak hanya dari dana desa”*.

⁴⁴ Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek, Laporan Kegiatan SEPEDA KEREN 1, 2020; Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek, Laporan Kegiatan SEPEDA KEREN 2, 2021. Jumlah dukungan APBDes tidak dipilah berdasar kegiatan dan lokasi desa.

Pendapat informan ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi atas kegiatan, termasuk bagaimana peran desa memberikan dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan dari anggaran desa. Alasan yang disampaikan adalah tidak adanya kebijakan teknis terkait penganggaran bagi kegiatan sebagai cantolan penganggaran atau “diambilkan dari mana”. Selain itu, desa telah memiliki prioritas penganggaran untuk program pembangunan desa, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19.

2. **Pemerintah desa kurang memahami program tetapi tetap memberikan dukungan** sambil menunggu informasi mengenai program ini dari pemerintah kabupaten. Seperti disampaikan oleh Ketua PKK Desa A Kecamatan 1, *“Program ini bermanfaat, kami memahami mengenai kelompok rentan dan SEPEDA KEREN ini akan melingkupi Musrena Keren. Kader desa kami mengusulkan untuk membentuk forum anak sebagai rencana tindak lanjut. Tetapi untuk pelaksanaan selanjutnya, termasuk pengelolaan kader dan juga masih perlunya pendampingan bagi kader sampai mereka siap dilepas, kami menunggu informasi dari pemerintah daerah (kabupaten)”*.

3. **Pemerintah desa yang terlibat dalam proses pelatihan dan komunikasi intens dengan kader biasanya memiliki pemahaman yang cukup baik.** Misalnya bagi anggota BPD perempuan dari Desa C kecamatan 3, program SEPEDA KEREN ini menambah pemahaman mengenai kelompok rentan, tata kelola yang inklusif dan bagaimana memfasilitasi mereka dalam forum perencanaan. Pengetahuan ini membantunya untuk melakukan pendekatan pada kelompok rentan, menggali usulan tentang kebutuhan mereka, dan berusaha untuk memperjuangkannya dalam forum perencanaan dan penganggaran di desa.

4. **Dukungan pemerintah desa selain dipengaruhi oleh pemahaman terhadap program, juga dipengaruhi oleh pengalaman bekerjasama dengan program pembangunan sebelumnya.** Seperti disampaikan oleh Kepala Desa E Kecamatan 5, yang menceritakan bahwa pemerintahnya terbuka untuk ide perubahan bagi kemajuan desanya. Desa tersebut merupakan wilayah pendampingan PEKKA dan sudah terbentuk Serikat Pekka di desa tersebut. Pemerintah desa merasa senang bahwa warganya mendapatkan pendidikan untuk kemajuan mereka, ditambah adanya kegiatan SEPEDA KEREN. Perubahan yang diamati oleh kepala desa dengan adanya pendampingan PEKKA dan adanya Kader SEPEDA KEREN yaitu:
 - Masyarakat, utamanya kelompok perempuan menjadi berani datang ke kantor desa dan menyampaikan pemikirannya.
 - Dalam forum perencanaan, seperti Musrena Keren dan Musrenbangdes, mereka menghadiri forum dan lebih berani menyampaikan usulannya.
 - Usulan dari anggota Kelompok Pekka saat Musrena Kecamatan diakomodir oleh kecamatan yaitu usulan jembatan gantung yang menghubungkan desa mereka ke kota, sehingga memudahkan akses yang dibutuhkan banyak warga desa.

Informan Kepala Desa E juga menyampaikan bahwa pemerintah desanya ingin mencapai Desa Mandiri. Menurutnya SEPEDA KEREN berpotensi memberikan kontribusi pada upaya-upaya kemajuan desa, karena warga menjadi lebih punya pengetahuan dan berperan aktif. Dukungan desa untuk kelompok rentan pada 2021 telah dianggarkan sejumlah Rp23 juta, yang peruntukannya adalah pelaksanaan KLIK dan pembiayaan Kader SEPEDA KEREN untuk melakukan pertemuan rutin di desa.

Berdasarkan pemaparan di bagian ini, yang perlu ditingkatkan pada Pemdes adalah pemahaman terkait tujuan dan manfaat Program SEPEDA KEREN, dukungan yang diperlukan dari desa, termasuk bimbingan teknis untuk menempatkan kegiatan tersebut di dalam alokasi penganggaran desa. Kurangnya pemahaman pemdes ini diakui oleh Kepala Dinsos P3A dan Kepala DPMD. Kepala Dinsos P3A menyatakan:

"...pemerintah desa perlu mendapatkan penguatan dalam teknis penganggaran bagi kelompok rentan termasuk asesmen untuk penyusunan programnya. Misalnya: penjelasan kode rekening penganggaran untuk kelompok rentan, pendataan penyandang disabilitas di desa untuk menyusun rencana pendampingan dan pelayanan yang dibutuhkan, alokasi APB Desa untuk layanan bagi disabilitas berdasarkan data, membangun fasilitas umum yang ramah disabilitas, bekerja sama dengan unit layanan yang diperlukan untuk mempermudah akses layanan bagi penyandang disabilitas (layanan kesehatan, pembuatan SIM bagi penyandang disabilitas), dsb" (Kepala Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek).

4.6.4 Pengaruh COVID-19 dan Adaptasi Program

Pandemi Covid-19 pada 2020 memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan revisi rencana pembangunan yang telah dilakukan, dan menyusun kebijakan darurat untuk mengatasi wabah ini. Sehingga secara langsung memengaruhi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN dalam beberapa hal, yaitu:

1. **Dukungan Pembiayaan:**

Pembiayaan program SEPEDA KEREN yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp450 juta, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk mencapai target pembelajaran pada kader di desa dalam satu tahun dan kegiatan pendukung. Rencana strategis yang telah ditetapkan untuk kegiatan SEPEDA KEREN dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19, termasuk pemotongan anggaran program sebesar 50%.

2. **Mundurannya Pelaksanaan Pelatihan dan Berkurangnya Jangka Waktu Pembelajaran bagi Kader serta Cakupan Pembelajaran:**

Program SEPEDA KEREN berencana melakukan pelatihan kader tahap pertama di 15 desa wilayah uji coba program, dan untuk selanjutnya melakukan pengembangan kelas baik di desa tersebut maupun desa lainnya. Pembelajaran tiap kelas direncanakan dilakukan selama 6-8 bulan dengan jumlah tatap muka sekitar 16 kali. Berkurangnya pembiayaan program berpengaruh pada rencana pembelajaran bagi kader, saat ini hanya dilakukan satu kali pembelajaran dengan jumlah tatap muka 5 kali selama 5 hari kerja. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas dan materi pembelajaran yang padat, menyebabkan masih belum optimalnya pengetahuan Kader untuk melakukan peran sebagai kader sesuai desain kegiatan.

3. **Tidak adanya dukungan pembiayaan pendampingan kader pasca pelatihan dan pemantauan pelaksanaan program secara berkala.** Sampai Juli 2021 belum ada rencana penguatan bagi mentor SEPEDA KEREN, pendampingan bagi kader untuk pendalaman materi dan kader melakukan praktik pengorganisasian pada kelompok rentan di desa. Kunjungan

untuk pemantauan program juga belum dilakukan. Berkurangnya dukungan pembiayaan yang berdampak pada kegiatan program memengaruhi keaktifan mentor dalam koordinasi dengan kader di desa penugasannya. Menurut kader di kecamatan 1 sampai Februari 2021 dari 5 mentor yang bertugas di kecamatan 1 hanya 1 orang yang masih aktif berkoordinasi dengan kader dan bersedia melakukan kunjungan secara mandiri. Mentor yang masih aktif memberikan dukungan biasanya berdomisili di kecamatan penugasan dan memiliki semangat kerelawanan untuk tetap membantu pendampingan pada kader. Menurut mentor kecamatan 1 dan informan dari Forum PUSPA, sampai pertengahan 2021 dari 25 orang mentor hanya 30% yang masih benar-benar aktif dan memiliki semangat kerelawanan untuk bekerja pada pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk kegiatan SEPEDA KEREN.

Sampai pertengahan Juli 2021, pemantauan kemajuan program untuk menghasilkan data terstruktur dan terukur mengenai kemajuan capaian program belum dilakukan, selain terdapat hambatan sumber daya, panduan pemantauan dan evaluasi partisipatif masih dalam proses penyusunan.

Adaptasi positif yang dilakukan oleh program ini adalah melibatkan kader untuk pemutakhiran DTKS, yang menghasilkan data jumlah kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19 di 15 desa lokasi ujicoba. Pendataan dilakukan mulai bulan Desember 2020 dan hasilnya dapat berkontribusi pada basis data distribusi bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan pada 2021.

Pelibatan Kader SEPEDA KEREN dalam advokasi pemutakhiran DTKS, sebetulnya memberikan pengalaman pembelajaran untuk pengelolaan data secara berkala, terutama data kelompok rentan yang menyumbang data yang valid bagi desa dalam perencanaan program dan penganggaran. Bagi Kader SEPEDA KEREN data ini dapat menjadi basis pengorganisasian dan advokasi mereka di desa.

4.7 RINGKASAN: ANALISIS PELAKSANAAN SEPEDA KEREN DAN CAPAIAN

Pelaksanaan SEPEDA KEREN selama periode 2019 sampai 2020 telah memberikan beberapa capaian seperti adanya mentor dan kader yang telah dilatih, mulai adanya perubahan pengetahuan dan sikap pemerintah desa terhadap keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan, adanya akses partisipasi kelompok rentan dalam forum perencanaan dan forum desa yang semakin besar, dan beberapa usulan Kader SEPEDA KEREN mulai diakomodir dan diapresiasi oleh pemerintah desa. Pemda Trenggalek juga cukup tanggap dalam memberikan dukungan pada ide-ide yang muncul dari kader, misalnya dukungan untuk desa ramah disabilitas, dukungan untuk pelatihan kewirausahaan kelompok rentan, dan dukungan teknis regulasi seperti Surat Edaran untuk melaksanakan kegiatan SEPEDA KEREN dan Musrena Keren di desa. Meskipun masih diperlukan regulasi yang lebih kuat, seperti Raperda PUG – yang menunggu untuk disahkan – sebagai payung pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek.

Ketika dikaitkan dengan perubahan yang terjadi pada kader sebagai kontribusi kegiatan SEPEDA KEREN, umumnya masih dalam level output (manfaat langsung dan perubahan praktis dari kegiatan) dan hanya sebagian kecil sudah pada level perubahan jangka pendek (perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan dan aspirasi). Kader SEPEDA KEREN masih memerlukan pendampingan dan pengayaan materi dan praktik agar mampu menjalankan peranannya di desa.

Dinsos P3A berkomitmen menyelenggarakan keberlanjutan pelatihan bagi kader di tahun 2021 di luar wilayah uji coba dengan mendorong kontribusi pembiayaan dari desa. Setidaknya sampai bulan Juli 2021, kegiatan SEPEDA KEREN telah melatih 482 kader yang tersebar di 81 desa (53,3% dari total 152 desa) di 11 kecamatan (78,5% dari total kecamatan).

Sesuai dengan tujuan pelaksanaannya untuk mendorong pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek, SEPEDA KEREN telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, yaitu:⁴⁵

- Mendorong semua desa melaksanakan Musrena Keren yang dihadiri oleh perwakilan kelompok rentan. Terdapat 482 kader kelompok rentan yang telah dilatih untuk menghadiri Musrena Keren serta forum perencanaan pembangunan reguler yang berjenjang, meningkatnya usulan kelompok rentan dalam daftar usulan (DU) RKP mulai tahun 2019 (30 usulan), 2020 (30 usulan) dan 2021 (42 usulan).⁴⁶
- Terdapat peningkatan usulan dari perempuan dan kelompok rentan yang diakomodasi oleh desa dan daerah. Contoh: APBDes di kecamatan 5 ujicoba telah menganggarkan beasiswa disabilitas anak di SDLB, upaya daerah untuk pemberdayaan disabilitas dengan pelatihan wirausaha 812 perempuan, 101 disabilitas, dan inovasi pada penyandang disabilitas didukung oleh Pemda Trenggalek dengan membentuk desa ramah disabilitas. Sampai pertengahan 2021 telah terdapat 60 desa ramah disabilitas di Kabupaten Trenggalek.
- Kegiatan SEPEDA KEREN, memengaruhi naiknya IPG Trenggalek dari 92,54 di tahun 2018 menjadi 92,74 di tahun 2019 dan 92,93 di tahun 2020, kemudian naiknya IDG dari 65,21 di tahun 2018 menjadi 66,86 di tahun 2019 dan 70 di tahun 2020. Artinya kegiatan SEPEDA KEREN berkontribusi pada indeks pembangunan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor ekonomi dan politik di daerah.

Dari sisi pelaku SEPEDA KEREN, aktor yang berperan besar adalah Dinsos P3A, yang menggerakkan mentor untuk melakukan pelatihan dan bersama-sama turun ke desa merespons RTL kader. Keaktifan mentor yang secara struktur dikelola oleh Forum PUSPA sangat bergantung pada pengelolaan dan koordinasi yang dilakukan Dinsos P3A. Forum PUSPA sebagai lembaga penanggung jawab pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN perannya masih belum maksimal dan memerlukan dorongan untuk memaksimalkan potensinya.

⁴⁵ Laporan SEPEDA KEREN 1 dan 2.

⁴⁶ Tidak ada informasi detail mengenai DU RKP yang berasal dari Musrena.

Bab 5.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

1. Pengembangan Desain SEPEDA KEREN

Pemda Trenggalek mengadopsi metode dan pengalaman OMS bekerja dengan kelompok rentan untuk diterapkan dalam SEPEDA KEREN. Proses desain program dilakukan secara partisipatif antara Pemda Kabupaten Trenggalek, yaitu Dinsos P3A dan OPD terkait lainnya (Sekda, Bappeda, DPMD), Forum PUSPA, Konsorsium OMS dan didukung oleh Program KOMPAK untuk menentukan:

- Visi misi.
- Komponen regulasi, kelembagaan, pelaksana kegiatan.
- Perubahan yang dikehendaki dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini adalah 5 tahun (2019-2024) sehingga luaran dan capaian dapat diukur.
- Aktivitas dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas tersebut.

2. Struktur Kelembagaan SEPEDA KEREN

Forum PUSPA merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN. Penetapan struktur kelembagaan SEPEDA KEREN melalui forum ini tepat dan strategis, karena forum ini memiliki potensi keberlangsungan kegiatan karena sebagai forum bersama antara pemerintah, OMS, serta pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi, media dan swasta dengan model kerja jaringan pemangku kepentingan. Keberadaan SEPEDA KEREN diharapkan dapat merevitalisasi forum ini untuk berperan mendorong pemberdayaan kelompok rentan sebagai gerakan bersama pada pemangku kepentingan yang tergabung di dalamnya. Memang saat ini fungsi Forum PUSPA sebagai penanggung jawab pelaksanaan program ini belum berjalan maksimal. Masih diperlukan upaya untuk mengintensifkan koordinasi internal dan memanfaatkan potensi jaringan pemangku kepentingan yang tergabung di dalamnya, sehingga peran dan fungsi institusi forum sebagai wadah terbuka untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak serta kelompok rentan lainnya di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan optimal.

3. Cakupan Kegiatan SEPEDA KEREN

Sumber daya kegiatan ini adalah 25 orang mentor, mereka merupakan fasilitator pelatihan bagi kader. Sampai bulan Juli 2021, Pemda Trenggalek telah melaksanakan pelatihan kader di 11 kecamatan atau 78,5% dari total 14 kecamatan di Trenggalek. Jumlah total kader SEPEDA KEREN per Juli 2021 adalah 482 kader yang tersebar di 81 desa atau 53,3% dari total desa di Kabupaten Trenggalek. Cakupan kuantitas kader ini sesuai dengan target SEPEDA KEREN untuk menjangkau kader secara massif, di mana dengan variasi kualitas kader pendampingan kapasitas sesuai desain program dapat dilakukan secara simultan oleh mentor dan pihak lain yang relevan.

4. Kontribusi SEPEDA KEREN pada Indikator Pembangunan Inklusif Daerah

- Semua desa telah melaksanakan Musrena Keren dan terdapat peningkatan kehadiran kelompok rentan dan usulan yang disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan di desa.
- Usulan yang disampaikan oleh kelompok rentan mendapatkan apresiasi dan Sebagian telah diakomodir oleh Pemdes dan Pemda, misalnya: APBDes di kecamatan 5 ujicoba telah menganggarkan beasiswa disabilitas bagi anak yang bersekolah di SDLB, Pemda Trenggalek merespons usulan untuk pelatihan wirausaha bagi kelompok rentan dengan memanfaatkan dukungan program donor lain yang telah menjangkau 812 perempuan dan 101 penyandang disabilitas, dan ide mengenai responsivitas pemerintah desa pada kebutuhan disabilitas didukung oleh Pemda Trenggalek dengan membentuk desa ramah disabilitas. Sampai bulan Juli 2021 telah terdapat 60 desa ramah disabilitas di Kabupaten Trenggalek.
- Adanya peningkatan indeks pembangunan seperti IPG dan IDG. IPG Kabupaten Trenggalek naik dari 92,54 di tahun 2018 menjadi 92,74 di tahun 2019 dan 92,93 di tahun 2020. Kemudian IDG meningkat dari 65,21 di tahun 2018 menjadi 66,86 di tahun 2019 dan 70 di tahun 2020. Peningkatan IDG berarti kegiatan SEPEDA KEREN berkontribusi pada indeks pembangunan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor ekonomi dan politik di daerah.

5. Praktik Baik Pelaksanaan Kegiatan SEPEDA KEREN

- Komitmen politik Bupati untuk transformasi tata kelola pemerintahan inklusif dan memberi ruang bagi kelompok rentan. Komitmen politik ini ditunjukkan dengan masuknya prinsip pembangunan inklusif dalam dokumen RPJMD 2021-2026, surat edaran dan dukungan anggaran dari APBD, sehingga dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan semakin banyak jumlah kader dan kelompok rentan yang mendapatkan penguatan kapasitas.
- Pembiayaan kegiatan SEPEDA KEREN mulai melibatkan pemerintah desa dengan pemanfaatan dana desa untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan transport bagi kader saat pelatihan atau pertemuan kader.

- Desain program yang partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan terkait lintas sektor, sehingga memperkaya perspektif dan juga dukungan lintas sektor bagi pelaksanaan program.
- Program inovasi ini mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh OMS yang telah teruji dan memiliki perspektif GESI yang kuat dalam setiap aspek tahapan program.
- Program ini memiliki modul dan metode belajar yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan kelompok rentan, dengan sedikit perbaikan untuk memperhatikan mekanisme dan metode fasilitasi yang mempertimbangkan ragam kebutuhan penyandang disabilitas.

6. Faktor yang Memengaruhi Kegiatan SEPEDA KEREN

- **Dukungan regulasi.** Meskipun belum memiliki regulasi yang kuat sebagai payung program pemberdayaan kelompok rentan, Pemda Trenggalek memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan teknis untuk mendorong pelaksanaan SEPEDA KEREN dan pembangunan inklusif daerah di mulai dari desa, misalnya penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang inklusif dengan memasukkan usulan dari Musrena Keren, arahan melibatkan kader dan mentor dalam forum perencanaan pembangunan yang berjenjang.
- **Dukungan lintas sektor.** Dukungan lintas sektor yang potensial misalnya DPMD bersama Dinsos P3A melakukan sosialisasi SEPEDA KEREN di desa, Pemda menyediakan Sekretariat Rumah Perempuan yang menjadi wadah pemberdayaan, dukungan program penguatan ekonomi dari OPD lain, dan program kewirausahaan untuk kelompok rentan.
- **Dukungan anggaran.** APBD Kabupaten Trenggalek 2019, 2020 dan 2021 tetap menganggarkan pelaksanaan program SEPEDA KEREN dengan besaran anggaran yang bervariasi besarnya karena pengaruh pandemi. Adanya dukungan ini tidak lepas dari upaya Dinsos P3A melakukan advokasi anggaran pembiayaan kegiatan SEPEDA KEREN pada Pemda Trenggalek dan mendorong Pemdes terlibat membiayai penyelenggaraan pelatihan Kader SEPEDA KEREN (membiayai pengeluaran konsumsi dan transport warga mereka sebagai kader yang dilatih).
- **Dukungan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.** Belum semua kecamatan dan pemerintah desa memberikan dukungan optimal pada pelaksanaan Kegiatan SEPEDA KEREN. Penyebab kondisi ini adalah mereka belum memahami sepenuhnya mengenai tujuan dan manfaat program. Hal ini dipahami oleh DPMD dan Dinsos P3A bahwa masih diperlukan sosialisasi mengenai program, termasuk pendampingan teknis pada desa dalam menyusun program/kegiatan dan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN.
- **Dampak dan adaptasi kegiatan terhadap pandemi COVID-19.** Terjadi pengurangan anggaran kegiatan sejumlah 50% pada tahun 2020 yang dialihkan bagi penanganan dampak pandemi di masyarakat. Konsekuensi pengurangan anggaran ini adalah berkurangnya jangka waktu pembelajaran dan intensitas pembelajaran/pendampingan mentor. Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas dan materi pembelajaran yang padat, menyebabkan diperlukannya pendampingan bagi kader untuk pendalaman materi dan melakukan praktik pengorganisasian pada kelompok rentan di desa.

7. Pengarusutamaan GESI dalam Kegiatan SEPEDA KEREN

Kegiatan ini telah mengimplementasikan prinsip GESI mulai dari desain program, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program. Hasil dari pelatihan Mentor dan Kader SEPEDA KEREN sudah terlihat pada perubahan perspektif terkait GESI, misalnya upaya merubah relasi gender yang lebih setara dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, hak perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan di desa, pemahaman tentang kelompok rentan dan haknya. Hal yang masih perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran perspektif GESI pada para pemangku kepentingan terutama pada pemerintah kecamatan, desa, masyarakat umum, dan OMS lokal adalah: 1) menyusun bahan yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan konteks sehari-hari. Misalnya pengertian kesetaraan gender, maksud dari inklusi sosial, mengapa isu ini penting terkait dengan hak kelompok rentan, dsb; 2) mendorong penerimaan sosial pada penyandang disabilitas, yang memandang mereka sebagai manusia yang memiliki potensi untuk kehidupannya dan masyarakat. Dukungan yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman pada pemangku kepentingan (terutama pemerintah desa) bahwa memberdayakan penyandang disabilitas sesuai potensi, kondisi dan kebutuhan mereka, bukan lagi bantuan (charity); 3) mendorong keterlibatan lebih banyak OMS lokal untuk terlibat dalam kegiatan SEPEDA KEREN, sehingga mereka memahami isu GESI dan membawa isu ini ke dalam organisasi dan jaringan kerja mereka.

8. Tantangan SEPEDA KEREN

- **Kapasitas mentor.** Sebagian besar mentor belum sepenuhnya memahami materi dengan baik, ketiadaan pertemuan koordinasi untuk penyegaran dan pendalaman materi, menyebabkan mentor mengalami kesulitan untuk menyampaikan materi kepada kader dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
- **Kapasitas kader.** Bagi kader dan mentor, pelatihan yang dilakukan dalam waktu yang singkat selama 5 hari pada akhir November 2021 dirasa kurang efektif. Pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan persiapan Pemilukada, di mana hampir separuh peserta adalah panitia pemungutan suara di desa, memengaruhi kehadiran kader saat pelatihan. Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas, materi pembelajaran yang padat menyebabkan pengetahuan mereka masih kurang untuk melakukan peran sebagai kader.
- **Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas** juga dilakukan pada pelatihan kader di 6 kecamatan lainnya pada tahun 2020 dan 2021. Secara umum pelatihan ini dilakukan dalam waktu satu hari pertemuan. Cakupan kuantitas kader yang dijangkau oleh kegiatan ini, perlu diimbangi oleh pertemuan lanjutan untuk memantapkan pemahaman terhadap tujuan dan materi keseluruhan SEPEDA KEREN.
- **Pembiayaan yang kurang memadai** untuk kebutuhan kegiatan. Alokasi anggaran yang dialihkan untuk pembiayaan penanganan pandemi corona, mengakibatkan kurangnya dukungan pembiayaan bagi pelaksanaan program. Misalnya:
 - Dalam desain program, terdapat kegiatan pendampingan kader yang dilakukan mentor pasca pelatihan kader dengan tujuan untuk penguatan materi dan kapasitas kader. Kegiatan ini tidak dilakukan karena tidak adanya dukungan pembiayaan.
 - Minimnya dukungan keuangan bagi mentor untuk melakukan pendampingan bagi kader, yang mempengaruhi keaktifan mereka untuk tetap memberikan pendampingan pada kader.

- **Proses pemantauan dan evaluasi.** Sampai pertengahan 2021, pelaku pelaksanaan SEPEDA KEREN belum melakukan pemantauan perkembangan kegiatan SEPEDA KEREN.
- **Kapasitas kelembagaan penanggung jawab pelaksanaan SEPEDA KEREN** yang belum maksimal sesuai peran dan fungsi yang diharapkan.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan, praktik baik dan tantangan yang dihadapi oleh SEPEDA KEREN, terdapat dua rekomendasi, yaitu rekomendasi yang disampaikan untuk pemerintah baik Kementerian terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan wilayah lainnya yang melakukan replikasi, dan rekomendasi secara umum:

1. **Kementerian Desa PDTT (Kemendesa) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPPA)** untuk mendorong SEPEDA KEREN sebagai model pemberdayaan bagi kelompok rentan. Pemberdayaan kelompok rentan di desa sangat terkait dengan pencapaian SDGs Desa.
2. **Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek**
 - Mendorong RaPerda PUG segera disahkan sehingga daerah memiliki acuan pelaksanaan program dan penganggaran secara lebih kuat, serta dukungan lintas sektor.
 - Memberikan dukungan pembiayaan dari APBD yang memadai untuk pelaksanaan SEPEDA KEREN, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tidak hanya untuk pelatihan saja tetapi juga pendampingan bagi kader, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, dan penyediaan fasilitas dan akomodasi yang lebih inklusif yang menunjang keterlibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
 - Saat ini strategi Pemda Kabupaten Trenggalek adalah meluaskan jangkauan pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan banyak kader. Kedepannya perlu dialokasikan waktu, pendanaan dan strategi⁴⁷ yang tepat untuk pendalaman materi sebagai penguatan kapasitas, agar mereka mampu menjalankan perannya sebagai kader SEPEDA KEREN.
 - Mendorong intensitas kerjasama lintas sektor untuk pelaksanaan SEPEDA KEREN. Lokus kegiatan adalah di desa, sehingga penting bagi OPD terkait (DPMD) melakukan sosialisasi dan penguatan bagi pemerintah desa, sehingga secara konsep dan teknis memahami kegiatan ini serta memberikan dukungan berbentuk program dan anggaran. Dalam kerangka kebijakan nasional, dukungan pemerintah desa untuk kegiatan ini dapat menjadi strategi akselerasi pencapaian SDGs Desa.
 - Mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran bagi kegiatan SEPEDA KEREN dan Kader. Alokasi anggaran ini dimungkinkan dengan merujuk pada regulasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - Memberikan penguatan kelembagaan Forum PUSPA sehingga lebih aktif melaksanakan perannya dalam mengelola sumber daya internal dan jaringan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan dan terlibat aktif. Forum PUSPA dapat memanfaatkan potensi jaringan kerja OMS lokal yang mampu menjangkau desa-desa. Kerja sama dengan OMS

⁴⁷ Termasuk menggunakan pertemuan daring untuk diskusi-diskusi rutin jika akses memungkinkan.

lokal dimungkinkan dengan model kolaborasi multipihak, di mana pemerintah menyediakan dukungan pendanaan⁴⁸ untuk pendampingan dalam pengorganisasian warga yang dilakukan Kader SEPEDA KEREN.

- Melakukan kerja sama dengan OMS yang memiliki keahlian untuk menguatkan kapasitas mentor dan kader.

3. Rekomendasi bagi Wilayah lain untuk Mereplikasi SEPEDA KEREN

- Mereplikasi kegiatan ini perlu diikuti oleh komitmen politik kepala daerah yang terlihat dalam komponen utama kegiatan, yaitu: regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang cukup sesuai jangka waktu pelaksanaan program.
- Melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dan OMS untuk memperkaya perspektif, desain program, dan komitmen melaksanakannya. Pemerintah daerah yang mereplikasi program ini, penting membangun kolaborasi dengan OMS yang memiliki jaringan sampai ke desa.
- Melakukan pemetaan sosial secara komprehensif dan partisipatif, sehingga data yang terkumpul mencerminkan permasalahan sesuai konteks desa yang beragam, yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai kondisi lokasi.
- Menguatkan kapasitas mentor dan kader dengan memperhatikan kebutuhan mereka untuk melaksanakan kegiatan sesuai keragaman konteks daerah.

4. Rekomendasi Umum

- Merancang strategi komunikasi dengan materi yang mudah dipahami sebagai alat sosialisasi program bagi pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat umum.
- Menyusun panduan kader dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
- Mempertimbangkan wilayah dampingan mentor sesuai dengan domisili atau dekat dengan domisili. Pertimbangan ini menjadi alternatif untuk kehadiran melakukan pendampingan intensif karena alasan jarak tempat tinggal yang jauh dengan dukungan pendanaan yang relatif kecil.
- Pentingnya melakukan pemantauan berkala untuk mendapatkan informasi kemajuan program, yang menjadi dasar perbaikan dan masukan bagi pencapaian.

⁴⁸ Pembiayaan bagi OMS dapat memanfaatkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, aturan ini diperbarui dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN:

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Surat Edaran Bupati Nomor: 360/152/406.018/2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022.

LITERATUR:

Arus, Yohanes da Masenus dkk. (2018). Content Analysis of the Most Significant Change Dataset Program MAMPU, Circle Indonesia dan MAMPU.

BPS Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2020

BPS Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020.

Daeli, Willy dkk. (2017). Dari Partisipasi ke Inklusi: Pembelajaran dari desain dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Center for International Forestry Research, <http://www.jstor.com/stable/resrep16223> diakses tanggal 16 Desember 2020.

Dharmawan, L., G.D.V. Pattinasarany & L. Hoo. 2018. Participation, Transparency and Accountability in Village Law Implementation: Baseline Findings from the Sentinel Villages Study. Jakarta, Local Solutions to Poverty & the World Bank

Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek. (2020). Laporan SEPEDA KEREN 1 2020.

Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek. (2021). Laporan SEPEDA KEREN 2 2021.

Hariyono, Tri. (2020). Partisipasi Perempuan Desa Karang Sari Dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif, Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Volume IX Nomor 2 Oktober 2020.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan KOMPAK, Modul SEPEDA KEREN, 2019

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan KOMPAK, Petunjuk Teknis SEPEDA KEREN, 2019

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, RPMJD Kabupaten Trenggalek 2021-2026.

Silalahi, Oberlin dan Ratnawati. (2016). Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender Di Kota Banda Aceh, Palastren, Vol. 9, No. 1.

Syukri, M. (2019). Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance SMERU Working Paper. Jakarta: SMERU. Diakses dari www.smeru.or.id.

LAMPIRAN 1.

VISI, MISI DAN TUJUAN SEPEDA KEREN

Maksud dari penyelenggaraan SEPEDA KEREN adalah sebagai pendidikan alternatif bagi perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup dalam upaya mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Tujuan dari penyelenggaraan SEPEDA KEREN adalah menyiapkan perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Visi SEPEDA KEREN adalah mewujudkan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Misi SEPEDA KEREN adalah:

- a. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif
- b. Menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif (gender champion)
- c. Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan
- d. Mendorong pengelolaan sumber daya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan



SEKOLAH PEREMPUAN,
DISABILITAS, ANAK DAN
KELOMPOK RENTAN LAINNYA

Sepeda keren